

TEAM BY
LAPTAH 2021

PRESENTED ON
MARET 2022



LAPORAN TAHUNAN 2021

PPN KEJAWANAN



2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya Laporan Tahunan Tahun 2021 dapat tersusun. Laporan Tahunan ini disusun merupakan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawatan Cirebon berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2012, baik yang menyangkut kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan maupun kegiatan lainya di PPN Kejawatan Cirebon.

Adapun tujuan dari pembuatan Laporan Tahunan ini adalah untuk memberikan informasi/gambaran mengenai perkembangan dan hasil capaian IKU dan operasional PPN Cirebon selama Tahun 2021 serta sebagai acuan perbaikan kinerja organisasi pada tahun mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Tahunan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa kami terima dengan senang hati untuk penyempurnaan dalam pembuatan Laporan Tahunan yang akan datang.

Akhirnya kami mengharap agar Laporan Tahunan ini dapat bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan.



Cirebon, Maret 2022
Plt. Kepala Pelabuhan

Muklis, S.Pi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Visi dan Misi	2
1.3.	Tujuan dan Sasaran.....	8
BAB II	PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BERBASIS ANGGARAN .	
2.1.	Alokasi Anggaran	11
2.2.	Realisasi Anggaran	11
2.3.	Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan	12
	2.3.1. Kegiatan Fisik	12
	2.3.1.1. Peningkatan jalan area pengembangan bagian barat	13
	2.3.1.2. Rehab Gedung kantor administrasi	14
	2.3.1.3. Pembuatan backdrop kantor	14
	2.3.1.4. Pembuatan garasi kantor.....	15
	2.3.1.5. Leveling foodcourt	16
	2.3.1.6. Pembuatan rumah bilas dan MCK	17
	2.3.1.7. Pembuatan saluran drainase wisata bahari	18
	2.3.1.8. Penyempurnaan kios kuliner	19
	2.3.1.9. Rehab jalan komplek	19
	2.3.2. Kegiatan Non Fisik.....	20
	2.3.2.1. Pengelolaan survey pengaduan masyarakat	20
	2.3.2.2. Technical Meeting surveillance ISO terintegrasi 9001:2015 sistem management mutu pelayanan dan ISO terintegrasi ISO 14001:2015 Managemen Lingkungan.....	21
	2.3.2.3. Kegiatan pelayanan kesyahbandaran di PP/TPI	23
	2.3.2.4. Bimbingan teknis sertifikasi keterampilan penanganan ikan (SKPI) bagi awak kapal perikanan di PPN Kejawatan.....	25
	2.3.2.5. Sertifikasi HAM Perikanan dan perjanjian kerja laut serta jaminan sosial bagi awak kapal perikanan	26
	2.3.2.6. Pengumpulan, verifikasi dan sosialisasi penerapan E-LBPI	27
	2.3.2.7. Sosialisasi pelayanan perijinan kapal perikanan	28

2.3.3. PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)	29
2.3.4. Manajemen Kepegawaian	30
2.3.4.1. Pembinaan Pegawai	30
2.3.4.2. Peningkatan kesehatan jasmani & Jum'at bersih	31
2.3.5. Administrasi Pengelolaan dan Pelaporan	
Kinerja Instansi Pemerintah	32
2.3.5.1. Administrasi Kegiatan	32
2.3.5.2. Perencanaan / Implementasi Pengelolaan SAI	32
2.3.5.3. Sistem pengendalian Intern	33
2.3.5.4. Manajemen Resiko	34
2.3.6. Kegiatan Kehumasan	34
BAB III CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	36
BAB IV STUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA	37
4.1. Kedudukan Tugas dan Fungsi	37
4.1.1. Fungsi Pemerintahan	37
4.1.2. Fungsi Pengusahaan	38
4.2. Stuktur Organisasi	38
4.3. Jumlah dan Komposisi Pegawai.....	40
4.4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	43
4.5. Kenaikan Pangkat Pegawai	44
4.6. Kenaikan Gaji Berkala.....	44
4.7. Usia Pensiun	44
4.8. Mutasi Pegawai	45
4.9. Mutasi Jabatan	46
BAB V OPERASIONAL PELABUHAN	48
5.1. Operasional Kesyahbandaran	48
5.1.1. Penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB)	49
5.1.2. Asuransi Nelayan Mandiri.....	54
5.1.3. Frekwensi kunjungan kapal perikanan	56
5.1.4. Logbook penangkapan ikan (LBPI)	59
5.1.5. Surat tanda bukti lapor (STBLKK)	
Kedatangan dan keberangkatan	63
5.1.6. Perkembangan Alat Penangkap ikan (API)	65
5.1.7. Jasa pengisian perbekalan kapal	67

a. Penyaluran air tawar bersih	67
b. Perbekalan bahan makanan	68
c. Bahan bakar minyak	69
5.1.8. Pengesahan Perjanjian Kerja Laut (PKL)	70
5.1.9. Pembinaan pelaksanaan sertifikat hasil tangkapan ikan Sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI).....	71
5.1.10. Tambat labuh kapal perikanan	74
5.2. Produksi Ikan	
5.2.1. Volume produksi ikan	76
5.2.2. Nilai produksi	78
5.2.3. Harga rata – rata ikan	80
5.3. Produksi Ikan Dominan	
5.3.1. Produksi dominan umum	80
5.3.2. Prodksi ikan dominan alat penangkap bouke ami	81
5.3.3. Produksi ikan dominan alat penangkap pukat cincin pelagis kecil	83
5.3.4. Produksi ikan dominan alat penangkap purse seine pelagis besar	84
5.3.5. Produksi ikan dominan alat penangkap gillnet/jarring insang.....	85
5.3.6. Produksi ikan dominan alat penangkap pancing cumi	86
5.3.7. Produksi ikan dominan alat penangkap cast net	86
5.4. Operasional pengembangan	
Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)	87
5.5. Pengendalian mutu hasil perikanan melalui	
Inspeksi pembongkaran ikan dan uji formalin	90
5.6. Sertifikasi cara penanganan ikan yang baik	91
5.7. Pelayanan Jasa	93
5.7.1. Jasa pas masuk	93
5.7.2. Pelayanan jasa kebersihan bongkar muat	95
5.7.3. Pelayanan jasa bengkel	96
5.7.4. Pelayanan jasa alat berat	96

5.7.5. Pelayanan jasa listrik	97
5.7.6. Pelayanan jasa air	98
5.7.7. Pelayanan jasa IPAL	100
5.7.8. Rekomendasi penggunaan tanah dan/atau bangunan	101
5.7.9. Jasa penggunaan bangunan pertemuan nelayan	103
5.7.10. Jasa tempat perbaikan jarring	103
5.7.11. Jasa cold storage	104
5.7.12. Jasa Mess	105
5.7.13. Jasa penggunaan tanah penjemuran ikan	106
5.8. Hubungan Kelembagaan	106
5.7.1. Surat menyurat	106
5.9. Penyelenggaraan K5	107
5.9.1. Keamanan dan ketertiban	108
5.9.2. Kebersihan dan keindahan	109
5.9.3. Keselamatan kerja	110
5.10. Wisata pantai di PPN Kejawanen Cirebon	110
BAB VI PEMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHANNYA	112
6.1. Permasalahan	112
6.2. Upaya pemecahan masalah	113
BAB VII PENUTUP	116

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 2.2. Pagu anggaran	11
Lampiran 2.3. Perkembangan pelaksanaan kegiatan	12
Lampiran 2.3.3. PNBP	29
Lampiran 3. Capaian IKU PPN Kejawatanan	36
Lampiran 4.5 Kenaikan gaji berkala & Kenaikan pangkat	44
Lampiran 5.8.1. Surat menyurat	107

DAFTAR TABEL

Tabel 4.3. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan	41
Tabel 4.4. Komposisi pegawai berdasarkan Pendidikan TKK	42
Tabel 4.8. Mutasi pegawai PPN Kejawanan	45
Tabel 4.9 Mutasi jabatan PPN Kejawanan	47
Tabel 5.1.1. Rekapitulasi keberangkatan kapal perikanan di PPN Kejawanan.....	53
Tabel 5.1.3. Rekapitulasi kunjungan kapal perikanan di PPN Kejawanan	57
Tabel 5.1.4. Rekapitulasi jumlah LBPI di PPN Kejawanan	61
Tabel 5.1.11. Tambat labuh dan kebersihan kolam	75
Tabel 5.2.2. Volume dan nilai produksi ikan per bulan	79
Tabel 5.6. Penerbitan sertifikat CPIB di PPN Kejawanan	91
Tabel 5.7.1.a. Jumlah kunjungan di PPN Kejawanan	93
Tabel 5.7.1.b. Jumlah kunjungan di PPN Kejawanan	94
Tabel 5.7.2. Kendaraan bongkar muat	95
Tabel 5.7.4. Sewa alat berat	97
Tabel 5.7.5. Pemakaian listrik investor	98
Tabel 5.7.6. Penyaluran air bersih di PPN Kejawanan	99
Tabel 5.7.7. Volume limbah cair yang dihasilkan	100
Tabel 5.7.8.a. Daftar investor di PPN Kejawanan	101
Tabel 5.7.8.b. Daftar investor di PPN Kejawanan	102
Tabel 5.7.9. Daftar penggunaan Gedung pertemuan nelayan	103
Tabel 5.7.10. Daftar penggunaan tempat perbaikan jarring	104
Tabel 5.7.11. Daftar penggunaan coldstorage	105

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.3.a komposisi pegawai berdasarkan golongan /pangkat	42
Grafik 4.3.b jumlah pegawai ASN menurut Pendidikan	42
Grafik 5.1.3. Kedatangan kapal perikanan di PPN Kejawanan	58
Grafik 5.2.1.a. Produksi ikan per bulan	76
Grafik 5.2.1.b. Produksi ikan per jenis API	77
Grafik 5.2.1.c. Produksi ikan per bulan per API	77
Grafik 5.3.1. Beberapa Jenis Ikan dengan Jumlah Produksi Dominan.....	81
Grafik 5.3.2. Produksi Ikan Dominan yang Ditangkap dengan Alat Penangkap Bouke Ami	82
Grafik 5.3.3. Produksi Ikan Dominan yang Ditangkap dengan Alat Penangkap Pukat Cincin Pelagis Kecil	83
Grafik 5.3.4. Produksi Ikan Dominan yang Ditangkap dengan Alat Penangkap Pukat Cincin Pelagis Besar	84
Grafik 5.3.5. Produksi Ikan Dominan yang Ditangkap dengan Alat Penangkap Gill Net/Jaring Insang	85
Grafik 5.3.6. Produksi Ikan Dominan yang Ditangkap dengan Alat Penangkap Pancing Cumi	86
Grafik 5.3.7. Produksi Ikan Dominan yang Ditangkap dengan Alat Penangkap Cast Net	87
Grafik 5.7.2. Aktifitas Kendaraan Bongkar Muat	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3.1.1. Peningkatan jalan area pengembangan bagian barat	13
Gambar 2.3.1.2. Rehab Gedung kantor	14
Gambar 2.3.1.3. Pembuatan backdrop kantor	15
Gambar 2.3.1.4. Pembuatan garasi kantor.....	16
Gambar 2.3.1.5. Leveling foodcourt.....	17
Gambar 2.3.1.6. Pembuatan rumah bilas dan MCK	18
Gambar 2.3.1.7. Pembuatan saluran drainase wisata bahari	18
Gambar 2.3.1.8. Penyempurnaan kios kuliner	19
Gambar 2.3.1.8. Rehab jalan kompleks	20
Gambar 2.3.2.2. a.Tim ISO Bersama plt dan sub coordinator PPN Kejawanan Mengikuti technical meeting kegiatan ISO 9001 dan 14001	23
Gambar 2.3.2.2.b Stuktur Tim ISO PPN Kejawanan	23
Gambar 2.3.2.3. Kegiatan Kesyahbandaran (koordinasi petugas).....	24
Gambar 2.3.2.4. Bimtek SKPI	25
Gambar 2.3.2.5. HAM Perikanan dan PKL serta Jamsos	27
Gambar 2.3.2.6. Sosialisasi E-logbook.....	28
Gambar 2.3.2.7. Sosialisasi pelayanan perijinan	29
Gambar 2.3.4.1.a Kegiatan Apel Senin diikuti offline dan virtual.....	30
Gambar 2.3.4.1.b Acara penyerahan SK kenaikan Pangkat PNS.....	31
Gambar 2.3.4.2.a Kegiatan Jumsih oleh seluruh pegawai	32
Gambar 2.3.4.2.b Kegiatan olah raga	32
Gambar 4.2. Stuktur organisasi PPN Kejawanan	39
Gambar 5.1. Kegiatan pelayanan kesyahbandaran	49
Gambar 5.1.1.a. Alur pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB)	50
Gambar 5.1.1.b. Tampiran upload dokumen pada teman SPB	51
Gambar 5.1.1.c. Sertifikasi ISO 9001:2015	54
Gambar 5.1.1.d. Kartu kendali STBL Keberangkatan	54
Gambar 5.1.3. Kegiatan kapal perikanan yang berkunjung ke PPN Kejawanan	56
Gambar 5.1.4. Kegiatan evaluasi dan aktivasi e-logbook penangkapan ikan.....	60
Gambar 5.1.5.a. Alur pelayanan penerbitan STBL kedatangan kapal	64
Gambar 5.1.5.b. STBL Keberangkatan dan perbekalan	65
Gambar 5.1.7.a Pengisian perbekalan air bersih.....	68
Gambar 5.1.7.b Pengisian perbekalan makanan.....	68
Gambar 5.1.7.c Pengisian perbekalan BBM.....	69
Gambar 5.1.8. Skema wewenang Syahbandar dalam implementasi HAM perikanan	70
Gambar 5.1.9. Alur pelayanan SHTI – Lembar Awal	72

Gambar 5.9.1.a Pengamanan mengikuti sesuai protocol kesehatan pada pengunjung Yang bekerja di sekitar kompleks PPN Kejawanan	108
Gambar 5.9.1.b Patroli gabungan Tim Kodim dan Koramil dalam rangka SPBB	109
Gambar 5.9.1.c Petugas memungut pas masuk saat jam kerja	109
Gambar 5.9.2. Rutinitas petugas kebersihan melaksanakan kebersihan dan keindahan Sekitar TPS juga sekitar kantor PPN kejawanan	110

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia 2045 untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Pencapaian visi tersebut dilakukan melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi. Pidato Presiden pada saat pelantikan tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan fokus-fokus pembangunan dalam lima tahun ke depan meliputi pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.

Kelima fokus program utama arahan presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan tersebut adalah (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Pembangunan perikanan tangkap 2020-2024

memiliki keterkaitan erat secara langsung dengan agenda penguatan ekonomi serta pengembangan wilayah.

Kegiatan pembangunan sub sektor perikanan tangkap oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Potensi pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap Indonesia masih sangat besar, yaitu potensi lestari sebesar 12,54 juta ton per tahun, dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 10,03 juta ton per tahun atau sekitar 80 persen dari potensi lestari, serta pemanfaatan usaha yang baru mencapai sebesar 7,53 juta ton sampai tahun 2019. Berbagai upaya akselerasi pembangunan perikanan tangkap selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan, serta konsumsi ikan masyarakat, yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.

1.2. Visi dan Misi

Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan adalah Unit Pelaksana Teknis di Kota Cirebon yang memiliki peran penting dalam menunjang Program Pembangunan Perikanan Tangkap selaku penanggung jawab Program Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap memiliki peran strategis, yakni sebagai: (i) penyedia bahan pangan dari perairan yang mempunyai nilai tinggi, ditinjau dari aspek nutrisi maupun ekonomi, (ii) penyedia lapangan kerja bagi masyarakat di daerah pesisir, (iii) salah satu bidang andalan dalam kegiatan ekonomi berbasis kelautan dan

perikanan yang turut serta dalam menjaga kedaulatan bangsa di laut, (iv) penyumbang potensial untuk mendorong peningkatan penerimaan negara, serta (v) identitas budaya negara maritim yang perlu dijaga dan dilestarikan.

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.

Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP menjalankan 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden yaitu:

Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

- Peningkatan Daya Saing SDM KP
- Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan

Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

- Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional

Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

- Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

- Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Tujuan pembangunan Kelautan dan Perikanan menjabarkan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

1. Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan, yakni:
 - a. Mengembangkan kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan Perikanan
 - b. Mengembangkan inovasi dan riset kelautan dan perikanan
2. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional, yakni:
 - a. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
 - b. Meningkatkan mutu, daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan.
3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yakni:
 - a. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati, serta;
 - b. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - c. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP,yakni:
 - a. Meningkatkan kinerja Reformasi Birokrasi KKP

Pembangunan Perikanan Tangkap yang ada dalam **Visi** Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”. Sedangkan **Misi** Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melaksanakan 4 (empat) Misi Presiden, dengan uraian sebagai berikut :

Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

- Penumbuhan Kewirausahaan Masyarakat Perikanan Tangkap
- Penguatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan Tangkap Perempuan

Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

- Peningkatan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur Perikanan Tangkap
- Melanjutkan Revitalisasi Industri Perikanan Tangkap dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0

Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

- Mitigasi Perubahan Iklim terhadap Ekosistem Sumber Daya Perikanan
- Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup Sumber Daya Perikanan

Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

- Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Tangkap

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka tujuan pembangunan pembangunan perikanan tangkap adalah :

1. Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap, yaitu peningkatan pemahaman, kapasitas, serta inisiatif inovasi masyarakat perikanan tangkap; dilakukan melalui pendampingan/fasilitasi usaha, diversifikasi usaha, pemberdayaan/perlindungan masyarakat perikanan tangkap, serta pengarusutamaan gender.
2. Membangun Struktur Ekonomi Perikanan Tangkap Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, yaitu pembangunan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing pada sub bidang perikanan tangkap, melalui pengelolaan sumber daya perikanan berbasis industrialisasi; peningkatan produktivitas sarana prasarana penangkapan, peningkatan kualitas ikan hasil tangkapan, serta implementasi keterpaduan sistem logistik ikan di pelabuhan perikanan.
3. Mencapai Lingkungan Hidup Sumber Daya Perikanan Yang Berkelanjutan, yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup pada sub bidang perikanan tangkap yang mencakup pengelolaan perikanan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP); penerapan harvest strategy, alokasi izin usaha berbasis alokasi sumber daya ikan, penggunaan sarana prasarana penangkapan ramah lingkungan, serta implementasi konsep eco-infrastructure.
4. Mewujudkan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya di Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, yaitu upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi DJPT yang berkualitas, mencakup penataan kerangka kebijakan, profesionalisme ASN, keterbukaan

perencanaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui implementasi komunikasi berbasis sistem informasi 4.0.

Berdasarkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap diturunkan ke Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sebagai berikut :

1. Sebagai “**Sentra Usaha Mina**” artinya bahwa Wilayah PPN Kejawanan Cirebon merupakan sentral bagi kegiatan-kegiatan perikanan dari 5 (lima) TPI (Tempat Pendaratan Ikan) yang ada di Kota Cirebon sepanjang garis pantai 7 km, yang akhirnya akan menjadi Infrastruktur dari Industri Perikanan dimasa mendatang.
2. “**Yang Berdaya Saing**” artinya Hasil Produksi/Tangkapan PPN Kejawanan mempunyai daya mutu yang berkualitas ekspor dikarenakan sangat menjaga nilai mutu sehingga Produk Perikanan yang di pasarkan sangat mahal. Pada Tahun 2014 Indonesia sudah mencapai tingkat kesuksesan yang mencakup kawasan Pelabuhan tidak hanya sebagai Tempat Pendaratan Ikan, tetapi juga meliputi Penangkapan Ikan, Pelelangan, Pengolahan dan Pemasaran Ikan. Di dalam kawasan Pelabuhan Perikanan ke depannya diharapkan pula adanya industri/perusahaan yang bergerak dalam penyediaan sarana produksi perikanan yang berwawasan pengolahan sumberdaya ikan yang berkelanjutan di mana dalam pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan harus memperhatikan dampak akibat dari pemanfaatan yang berlebihan sehingga ikan tidak punah.

1.3. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut diperlukan langkah – langkah tujuan dan sasaran program yang hendak di capai dalam oprasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan merupakan penjabaran masing-masing tugas pokok dan fungsi serta misi yang telah ditetapkan tujuan pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan adalah :

1. Dengan pelayanan prima diharapkan para masyarakat /nelayan /stakeholder menerima kemudahan segala kebutuhannya yang sesuai dengan pelayanan yang disediakan di PPN Kejawanan Cirebon;
2. Pelabuhan sebagai kluster perikanan sekaligus pusat pertumbuhan industri perikanan terpadu hal ini dimaksudkan untuk memudahkan para nelayan-nelayan kecil membuka pasar ekonomi dimana akan terjadi transaksi secara menyeluruh dalam satu lokasi yaitu di alokasikan pada PPN Kejawanan Cirebon;
3. Peningkatan produksi yang diikuti dengan peningkatan mutu, hal ini dimaksudkan dengan peningkatan yang tinggi harus di usahakan nilai produksi yang tinggi pula, contohnya dengan peningkatan mutu ikan yang dihasilkan harus, sehat, segar, dan bebas formalin. Maka di Pelabuhanlah yang akan menyediakan wadah untuk meguji sample ikan yang sudah bebas dari formalin. Setelah bebas dari formalin maka ikan tersebut boleh dipasarkan;
4. Pelabuhan perikanan sebagai Pusat Informasi dan Data Statistik Perikanan, diharapkan kedepannya PPN Kejawanan Cirebon adalah wakil dari seluruh Tempat Pendaratan Ikan/Tempat Pelelangan Ikan yang semua

itu adalah wadah penghasil jumlah data dan statistik volume ikan yang di tangkap perhari, perbulan maupun pertahunnya di Kota Cirebon;

5. Menciptakan lingkungan pelabuhan perikanan yang bersih higienis, adalah tolak ukur dari mutu ikan yang akan dipasarkan didaerah tangkapan oleh karena itu baik cara ataupun tindakan pemeliharaan fasilitas-fasilitas pelabuhan yang bersih sangat diperhatikan;
6. Pelabuhan perikanan sebagai fasilitator dalam pengembangan wisata bahari, hal ini dikembangkan sebagai wadah Pendidikan bagi Pelajar untuk mengenalkan Bahwa Laut adalah salah satu kekayaan Indonesia yang indah dan tidak akan pernah habis, oleh karena itu dengan wadah Wisata Bahari diharapkan membangkitkan para generasi muda untuk lebih mencintai laut baik Flora maupun Fauna Laut yang ada di Ekosistem laut;
7. Meningkatkan multiplier effect bagi masyarakat Kota Cirebon melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja, diharapkan dengan Pemusatan Kegiatan di Sektor Perikanan maka diharapkan dapat menyerap tenaga kerja di kota Cirebon sendiri, sebagai contoh, Pekerja dalam bidang Pengasinan, Penyortiran, Pembersih, Pengeringan dan lain-lain. Hal ini juga diharapkan dengan penambahan tenaga kerja yang bekerja di areal PPN Kejawanan Cirebon maka akan mengurangi tingkat kejahatan dengan peningkatan taraf hidup seseorang dari menganggur menjadi pekerja;
8. Pelabuhan perikanan sebagai tempat pemantauan dan pengawasan (monitoring dan control) sumber daya ikan, tahap akhir dari semua itu diharapkan Pelabuhan Perikanan adalah media untuk mengontrol dan memonitoring baik para Nelayan/Steakholder yang ada di Kota Cirebon untuk menjaga dan mengontrol Kebutuhan Usahanya di Bidang Perikanan

dalam hal Penangkapan Ikan yang Berlebih karena hal ini sudah termasuk merusak Ekosistem Laut sehingga Sumberdaya Ikan yang ada lambat laun akan habis dan tidak ada lagi, sehingga akan terjadi kepincangan/ ketidakseimbangan Ekosistem Darat dan laut.

BAB II

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BERBASIS ANGGARAN

2.1. Alokasi Anggaran

Tahun anggaran 2021 kegiatan pembangunan pengembangan dan oprasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan merupakan kegiatan pembangunan tahun sebelumnya yang telah direncanakan. Adapun segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan diarahkan untuk mewujudkan Visi dan Misi pelabuhan yang berorientasi pada kinerja pelabuhan. Oleh karena itu, operasional pelabuhan dapat berjalan dengan baik dikarenakan adanya dukungan dana APBN melalui Daftar Isian Penguana Anggaran (DIPA), Tahun 2021 senilai **Rp. 12.084.369.000,-** dan anggaran penyelenggaraan kegiatan yang dibiayai PNBPN sebesar **Rp. 1.600.599.000,-** sudah termasuk didalamnya. Alokasi anggaran tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2020 sebesar **Rp. 12.229.273.000,-** atau mengalami penurunan sebesar **Rp. 144.904.000,-** .

2.2. Realisasi Anggaran

Dalam perkembangan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021 Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan telah mencapai realisasi sebesar **98,81 %** atau sebesar **Rp. 11.940.808.587,-** dari total anggaran atau nilai PAGU sebesar **Rp. 12.084.369.000,-** dengan penjabarannya yang dapat dilihat pada **lampiran 2.2.**

2.3. Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan agar optimal, efektif, dan efisien diperlukan sarana/ prasarana menandai yang dapat mendukung kegiatan pelayanan kepada masyarakat / pengguna jasa pelabuhan.

Dalam rangka menunjang kegiatan operasional secara umum sarana dan prasarana adalah salah satu penunjang keberhasilan suatu proses pelayanan publik. Seringnya berjalan waktu sarana dan prasarana mengalami penurunan baik kualitas dan kuantitas, oleh karena itu perlu dilakukan penambahan serta pemeliharaan sarana maupun prasarana.

Pengadaan sarana dimaksud adalah belanja kelengkapan kerja sebagai pendukung operasional kerja administrasi kantor agar berkelanjutan guna mendukung operasional pelabuhan dan pelayanan terhadap pengguna jasa. Adapun pengadaan sarana dimaksud dapat dilihat pada **lampiran 2.3**.

2.3.1. Kegiatan Fisik

Pada tahun 2021, PPN Kejawanan melaksanakan kegiatan rehab dan pemeliharaan fasilitas dengan dana yang berasal dari anggaran DIPA PPN Kejawanan Nomor : SP DIPA-032.03.2.622482/2021 antara lain adalah Peningkatan Jalan Area Pengembangan Bagian Barat, Rehab Gedung Kantor administrasi, Pembuatan Backdrop Kantor, Pembuatan Garasi, Leveling Foodcourt, Pembuatan Rumah Bilas dan MCK, Pembuatan Saluran Drainase Wisata Bahari, Penyempurnaan Kios Kuliner, dan Rehab Jalan Komplek.

2.3.1.1. Peningkatan Jalan Area Pengembangan Bagian Barat

Area Pengembangan bagian barat PPN Kejawanon merupakan area yang akan difungsikan sebagai area industri sedangkan area bagian timur akan difungsikan sebagai area pengembangan wisata bahari. Kondisi eksisting area pengembangan bagian barat masih berupa tanah basah sehingga diperlukan adanya pembangunan sarana prasarana pokok maupun fungsional agar dapat membuat daya tarik bagi investor yang akan berinvestasi di PPN Kejawanon yang akan berdampak pada perkembangan aktifitas ekonomi serta peningkatan PNBP PPN Kejawanon. Pekerjaan Peningkatan jalan area pengembangan bagian barat dilaksanakan untuk dapat menyediakan akses jalan yang selama ini belum tersedia. Pekerjaan yang dilaksanakan masih berupa leveling dengan panjang 179 M dengan metode yang diawali dengan pemasangan cerucuk bambu diameter 8 – 10 cm dengan alat excavator kemudian dilapis seseg bambu, setelah itu baru digelar material limestone serta agregat sirtu dan dipadatkan menggunakan Vibration Roller sambil dilakukan penyiraman air bersih menggunakan water tanker. Selain itu juga dilakukan pembuatan plat decker menggunakan beton ready mix dengan kualitas beton K 300 yang dibuktikan dengan hasil laboratorium ready mix.



Gambar 2.3.1.1. Peningkatan Jalan Area Pengembangan Bagian Barat

2.3.1.2. Rehab Gedung Kantor Administrasi

Gedung Kantor merupakan salah satu fasilitas fungsional berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 08 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, kondisi eksisting gedung kantor yang sejak dibangun pada tahun 2002 belum pernah mengalami renovasi/perbaikan terutama pada bagian lantai dan rangka atap yang masih menggunakan kayu yang dikhawatirkan menjadi lapuk dan dapat membahayakan pegawai PPN Kejawatanan. Oleh karena itu pada tahun 2021 dilakukan rehab gedung kantor administrasi yang terdiri dari penggantian rangka atap menggunakan baja ringan dengan penutup atap genteng metal berpasir, mengubah tampilan depan menggunakan material ACP tipe PVDF serta pemasangan lantai granit.



Gambar 2.3.1.2 Rehab Gedung Kantor

2.3.1.3. Pembuatan Backdrop Kantor

Kantor PPN Kejawatanan merupakan tempat beraktifitas pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi baik dalam pemerintahan maupun pelayanan. Dengan kantor yang tertata rapi, maka semua proses bisnis tersebut dapat berjalan dengan baik. Interior dan kondisi kantor yang tertata rapi membuat pegawai merasa nyaman bekerja, meningkatkan produktivitas kinerja

pegawai selain itu juga memberikan kesan positif kepada tamu atau relasi yang berkunjung. Secara tidak langsung kita telah memasarkan identitas atau citra profesional dari PPN Kejawanan. Pembuatan Backdrop kantor dilaksanakan setelah pekerjaan rehab gedung kantor selesai, adapun material yang digunakan berupa multiplek finishing lapisan HPL yang dilengkapi ornamen yang dibuat dari material acrylic dan diberikan sentuhan aksen ciri khas kota Cirebon yaitu mega mendung.



Gambar 2.3.1.3 Pembuatan Backdrop Kantor

2.3.1.4. Pembuatan Garasi Kantor

Garasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rumah – rumahan atau bagian dari kawasan yang digunakan sebagai tempat menyimpan kendaraan dari cuaca panas maupun hujan. Selain itu garasi juga mempunyai manfaat untuk mengurangi resiko terjadinya tindakan kriminal, karena dengan penempatan dan penyimpanan kendaraan menjadi satu tempat akan lebih aman serta mudah dalam melakukan kontrol pengawasannya. PPN Kejawanan melaksanakan pembangunan garasi bertujuan untuk mengakomodir kendaraan pengguna jasa yang melakukan aktifitas di gedung pelayanan terpadu dan kendaraan pegawai baik roda 2 maupun roda 4.

Garasi yang dibangun menggunakan lantai cor beton tebal 8 cm, paving block dengan pinggiran dipasang kansteen serta kanopi menggunakan material pipa galvanis diameter 3 (tiang) dan diameter 2 (rangka).



Gambar 2.3.1.4 Pembuatan Garasi kantor

2.3.1.5. Leveling Foodcourt

Penataan kawasan pantai telah dilakukan dengan menyediakan kios kuliner pada tahun 2020 yang dilanjutkan dengan pekerjaan leveling foodcourt pada tahun 2021 untuk menciptakan kondisi dan suasana pelataran/halaman kios kuliner PPN Kejawan an agar menjadi rapi dan indah serta nyaman digunakan pengunjung/wisatawan baik lokal maupun luar kota saat menikmati sunrise, sunset serta keindahan pantai kejawan an sambil menikmati jajanan yang dijual di area kios kuliner. Pekerjaan leveling foodcourt menggunakan material keramik motif anti slip ukuran 40 x 40 yang dilengkapi biopori yang berfungsi sebagai penyerapan air sehingga tidak menimbulkan genangan air pada saat hujan.



Gambar 2.3.1.5. Leveling Foodcourt

2.3.1.6. Pembuatan Rumah Bilas dan MCK

Kita kerap mengabaikan sarana kebersihan dan fasilitas toilet karena menganggap itu hal yang kotor. Padahal, ketersediaan sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) yang baik, dan bersih merupakan sarana dasar yang akan menciptakan kualitas hidup menjadi lebih sehat.

Di sektor wisata misalnya, fasilitas sanitasi seperti toilet menjadi faktor penting dalam pelayanan sektor pariwisata. Beberapa survei menyebutkan, keberadaan toilet publik yang layak dan bersih bisa memengaruhi tingkat kunjungan wisatawan. Karena itu urusan sanitasi ini menjadi sangat penting untuk mendukung sektor pariwisata maupun tatanan *new normal* di tengah situasi pandemi.

Untuk mendukung ketersediaan dan prasarana sanitasi yang bersih dan layak di kawasan pantai PPN Kejawanan dengan sistem pengolahan air limbah yang ramah lingkungan dibangun rumah bilas dan MCK ukuran 7 x 5 M terdiri atas 8 ruang bilas tertutup serta area bilas outdoor sedangkan material yang digunakan antara lain pemasangan cerucuk bambu di bawah pondasi karena lokasi masih berupa tanah basah sehingga diperlukan cerucuk bambu sebagai penguat pondasi, lantai rabat beton dan keramik sedangkan atap menggunakan

baja ringan C75 dengan penutup atap alderon yang juga dilengkapi septic tank biofil.



Gambar 2.3.1.6 Pembuatan Rumah Bilas dan MCK

2.3.1.7. Pembuatan Saluran Drainase Wisata Bahari

Dalam melakukan pembangunan infrastruktur berupa jalan, bangunan di lahan manapun, drainase adalah komponen tambahan yang penting untuk diperhatikan. Secara literal, definisi sistem drainase adalah sebuah saluran air yang dibangun sebagai upaya untuk menyalurkan massa air berlebih serta sebagai metode untuk menghindari terjadinya genangan air.

Bangunan kios kuliner PPN Kejawanon berjumlah 40 buah kios akan menimbulkan limbah cair dari pencucian alat – alat makan dan lain sebagainya, sehingga untuk menyalurkan limbah dari kios harus dibuat saluran. Pekerjaan saluran drainase dalam bentuk U ditch ukuran 30 x 30 x 120 cm menuju bak penampungan berukuran 4,5 x 1,65 m yang terdiri dari 4 bak pengendapan.



Gambar 2.3.1.7 Pekerjaan Pembuatan Saluran Drainase Wisata Bahari

2.3.1.8. Penyempurnaan Kios Kuliner

Kondisi eksisting kios kuliner yang berjumlah 40 kios masih terbuka/ belum ada pintu untuk bagian belakang serta lantai kios kuliner masih berupa rabat beton, sehingga agar kios kuliner dapat dimanfaatkan lebih layak oleh pedagang dilakukan penyempurnaan kios kuliner dengan menutup bagian belakang kios menggunakan material spandek serta memasang keramik lantai 40 x 40 serta penambahan meja bagian depan dan bagian belakang menggunakan material hollow dan ACP.



Gambar 2.3.1.8 Penyempurnaan Kios Kuliner

2.3.1.9. Rehab Jalan Komplek

Jalan merupakan salah satu fasilitas pokok berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, kondisi eksisting jalan khususnya yang berlokasi di pertigaan antara TPI Higienis dan Gedung Pelayanan dalam kondisi berlubang dan kondisi tikungan masih sempit sehingga menyulitkan kendaraan tangki/truck/kontainer yang akan melewati. Oleh karena itu dilakukan rehab jalan kompleks menggunakan material perkerasan jalan lapis permukaan HRS dan pelebaran tikungan dengan dipasang kansteen ukuran 60 x 30 cm.



Gambar 2.3.1.9 Rehab Jalan Komplek

2.3.2. Kegiatan Non Fisik

2.3.2.1. Pengelolaan Survey Pengaduan Masyarakat

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Salah satu cara penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat. Manfaat Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan Kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

Dan dengan Penerapan Standar Pelayanan adalah sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau penurunan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan. Hasil dari survey kepuasan masyarakat pada tahun 2021 di triwulan I adalah **83,14**, Triwulan II adalah **81.50**, Triwulan III adalah **82.79** dan untuk triwulan IV adalah **86,23** , jika di rata-rata kinerja dari unit pelayanan adalah **83,42 Nilai A**.

2.3.2.2. Technical Meeting surveillance ISO terintegrasi 9001:2015 Sistem Menejemen Mutu pelayanan dan ISO terintegrasi ISO 14001:2015 Menejemen Lingkungan

ISO 9001 merupakan suatu sistem Internasional yang bertujuan agar pelayanan publik dapat optimal, yaitu dengan cara memperbaiki *Standard Operational Procedure* (SOP) yang sudah ditetapkan sebelumnya secara berkala. Terdapat 5 jenis pelayanan di PPN Kejawanan yang telah dimasukkan ke dalam sistem ISO 9001, yaitu pelayanan penerbitan SPB, pelayanan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI), pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan (STBLK) kapal perikanan, *Logbook* Penangkapan Ikan (LBPI) dan pelayanan sewa lahan. Telah dilaksanakan audit

ISO 9001 : 2015 pada tahun 2021 di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan.

ISO 14001 adalah standar yang disepakati secara internasional untuk persyaratan sistem manajemen lingkungan. Standar Ini membantu organisasi meningkatkan kinerja lingkungan mereka melalui penggunaan sumber daya dan pengurangan limbah yang lebih efisien, memperoleh keunggulan kompetitif dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan termasuk pelanggan. Sistem manajemen lingkungan membantu organisasi mengidentifikasi, mengelola, memantau dan mengendalikan masalah lingkungan mereka secara menyeluruh. Ini berarti bahwa ISO 14001 dapat diintegrasikan dengan mudah ke dalam sistem manajemen ISO yang ada. ISO 14001 cocok untuk semua jenis organisasi, baik itu perusahaan perseorangan, perusahaan non profit ataupun pemerintahan. Hal ini membutuhkan bahwa organisasi menganggap semua masalah lingkungan yang berhubungan dengan operasinya, seperti polusi udara, masalah air dan limbah, pengelolaan limbah, pencemaran tanah, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan penggunaan sumber daya dan efisiensi. Telah dilaksanakan audit ISO 4001 : 2015 pada tahun 2021 di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan.



Gambar 2.3.2.2.a Tim ISO bersama plt dan subkoordinator PPN Kejawanan mengikuti Technical Meeting Kegiatan ISO 9001 dan ISO 14001.



Gambar 2.3.2.2.b. Stuktur Tim ISO PPN Kejawanan

2.3.2.3. Kegiatan pelayanan kesyahbandaran di PP/TPI

Terdapat 2 orang Syahbandar Perikanan PPN Kejawanan yang ditempatkan di PP/TPI, hal ini mengacu kepada Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Penempatan dan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan di Jakarta pada 08

September 2021, mencantumkan Rakim, S.St.Pi selaku Sub Koordinator Kelompok Sesyahbandaran sekaligus Syahbandar Perikanan bertugas di PPN Kejawatan. Selain itu, terdapat Syahbandar Perikanan atas nama Tobing Sutomo, A.Pi bertugas di instansi induk PPN Kejawatan namun ditempatkan di PP. Eretan, Kabupaten Indramayu. Selain itu, di dalamnya juga mengatur 1 orang lagi Syahbandar Perikanan PPN Kejawatan atas nama Jamaludin, A.Md., S.Pi ditempatkan di Pelabuhan Perikanan, yakni PP. Blanakan dan PP. Muara Ciasem, Kabupaten Subang.

Syahbandar Perikanan yang ditugaskan di luar PPN Kejawatan ini tetap melaksanakan kegiatan kesyahbandaran sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan, termasuk di dalamnya pelaksanaan asuransi nelayan mandiri dan mengesahkan Perjanjian Kerja Laut (PKL).



Gambar 2.3.2.3 Kegiatan kesyahbandaran (Koordinasi petugas)

2.3.2.4. Bimbingan Teknis Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI) Bagi Awak Kapal Perikanan Di PPN Kejawanan

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI) bagi awak kapal perikanan di PPN Kejawanan, diharapkan stakeholder dan awak kapal perikanan mempunyai kompetensi yang mampu diterapkan dalam hal penanganan bahan baku yang berasal dari ikan. Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Januari 2021 dengan peserta berasal dari awak kapal perikanan (Anak Buah Kapal dan Nahkoda) dengan jumlah peserta orang yang terdiri dari 32 orang peserta baru yang belum memiliki sertifikat. Peserta yang sudah memiliki SKPI tidak diberikan sertifikat setelah mengikuti kegiatan tersebut.



Gambar 2.3.2.4 Bimbingan Teknis Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI)

Bimbingan Teknis Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI) dilaksanakan dengan tujuan :

1. Membekali *stakeholder* tentang cara mempertahankan mutu dan meningkatkan keamanan produk perikanan;
2. Meningkatkan produktivitas pengolahan hasil perikanan yang ramah lingkungan;
3. Meningkatkan standar bidang pengolahan hasil perikanan yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
4. Mendorong peningkatan konsumsi ikan;
5. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia dibidang pengolahan hasil perikanan;
6. Memberikan pembekalan mengenai penerbitan Sertifikasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) kepada *stakeholder*.

2.3.2.5. Sertifikasi HAM Perikanan dan Perjanjian Kerja Laut serta Jaminan Sosial bagi Awak Kapal Perikanan

PPN Kejawanan melalui Subkoordinator Kelompok Kesyahbandaran didampingi Plt. Kepala Pelabuhan bersama BPJS Ketenagakerjaan Cirebon menyelenggarakan kegiatan Sertifikasi HAM Perikanan dan PKL serta Jaminan Sosial bagi Awak Kapal Perikanan di Balai Pertemuan Nelayan di bulan September 2021, kegiatan ini diikuti oleh 30 orang peserta yang merupakan Pemilik Kapal dan Pengurus Kapal. Kegiatan dilaksanakan bersama dengan BP Jamsostek Cabang Cirebon sebagai mitra kerja sama penyelenggaraan

asuransi nelayan mandiri sejak tahun 2018. Asuransi Nelayan merupakan salah satu poin dalam Perjanjian Kerja Laut, dimana hal ini merupakan implementasi dari Hak Asasi Manusia (HAM) di bidang perikanan. Bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cirebon.



Gambar 2.3.2.5 HAM Perikanan dan PKL serta Jaminan Sosial

2.3.2.6. Pengumpulan, Verifikasi dan Sosialisasi Penerapan E – LBPI

Pada tahun 2021, telah dilaksanakan kegiatan pengumpulan dan verifikasi data E - Log Book Penangkapan Ikan terhadap 100 orang Nelayan (Nakhoda, Awak Kapal Perikanan) dan pengurus kapal perikanan. Selain

kegiatan pengumpulan dan verifikasi E - Log Book Penangkapan Ikan, dilaksanakan pula Sosialisasi Penerapan E - Log Book Penangkapan Ikan di Balai Pertemuan Nelayan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan terhadap 40 orang peserta.



Gambar 2.3.2.6 Kegiatan sosialisasi E-logbook di PPN Kejawanan

2.3.2.7. Sosialisasi Pelayanan Perizinan Kapal Perikanan

Sosialisasi Pelayanan Perizinan Kapal Perikanan < 30 GT dilaksanakan pada 08 Desember 2022 bertempat di Balai Pertemuan Nelayan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan. Kegiatan ini mengundang 30 orang peserta yang terdiri atas Pemilik Kapal dan Pengurus Kapal. Kegiatan ini dihadiri oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Dinas Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Jawa Barat sebagai Narasumber.



Gambar 2.3.2.7. Kegiatan sosialisasi Pelayanan Perizinan Kapal Perikanan

2.3.3. PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikelola oleh PPN Kejawanan berupa PNBP yang berasal dari Sumber Daya Alam/SDA (tambak labuh, perijinan kapal perikanan >30GT) dan non SDA (imbal jasa UPT PPN Kejawanan). Peraturan yang digunakan dalam menetapkan besarnya tarif yang berlaku di PPN Kejawanan Cirebon adalah Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berdasarkan **PP 85 tahun 2021 yang berlaku mulai 18 September 2021** sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2015.

Realisasi PNBP di PPN Kejawanan Cirebon tahun 2021 tercatat sebesar **Rp.4.749.810.538,-** dari target PNBP **Rp.4.828.396.750,-** atau dengan kata lain realisasi PNBP mencapai **98.37 %** dari target. Realisasi tersebut mengalami kenaikan **57.56 %** dari realisasi tahun 2020 yang mencapai **Rp.3.014.684.047,-**, Kenaikan tersebut dikarenakan pada tahun 2021 karena adanya perubahan kebijakan PP 75 tahun 2015 diganti menjadi kebijakan PP 85 tahun 2021 per tanggal 18 September 2021. Laporan PNBP 2020 dapat dilihat pada **lampiran 2.3.3.**

2.3.4. Manajemen Kepegawaian

ASN (Aparatur Sipil Negara) sebagai aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, dalam pelaksanaan tugasnya memerlukan SOP, analisis beban kerja, analisis kinerja pegawai dan sasaran kinerja pegawai. Sebagai upaya optimalisasi secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai secara individu.

2.3.4.1. Pembinaan Pegawai

Dalam rangka peningkatan kinerja pegawai baik ASN (Aparatur Sipil Negara) maupun Tenaga Kerja Kontrak (TKK), secara periodik Kepala Pelabuhan serta sub koordinator memberikan, arahan dan evaluasi melalui pertemuan dan pada saat apel.



Gambar 2.3.4.1.a. Kegiatan Apel Senin yang diikuti offline dan secara virtual bagi yang berhalangan



Gambar 2.3.4.1.b. Acara penyerahan SK Kenaikan pangkat untuk PNS.

2.3.4.2. Peningkatan Kesehatan Jasmani dan Jum'at Bersih

Untuk mendukung pegawai dalam menjalankan tugas sehari - hari, maka pegawai pelabuhan selalu menjaga kebugaran dan kesehatan jasmani melalui kegiatan senam rutin setiap 2 minggu satu kali, 2 minggu yang lain digunakan untuk kegiatan Jum'at bersih.



Gambar 2.3.4.2.a Kegiatan jum'at bersih oleh seluruh pegawai PPN Kejawanan



Gambar 2.3.4.2.b Kegiatan olah raga di bawah sinar matahari pagi, meningkatkan daya tahan tubuh

2.3.5. Administrasi Pengelolaan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah

2.3.5.1. Administrasi Kegiatan

Kegiatan administrasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dilaksanakan melalui pembuatan Laporan Tahunan (LAPTAH) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang memberikan gambaran perkembangan operasional pelabuhan perikanan tahun sebelumnya selama 1 (satu) tahun, serta pertanggungjawaban perkembangan pelaksanaan kegiatan berbasis anggaran yang diukur seberapa besar sasaran yang telah tercapai.

2.3.5.2. Perencanaan / Implementasi / Pengelolaan SAI

Dalam kegiatan keuangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan terdapat pelaksanaan SAI (Sistem Akuntansi Instansi) yang berbagai menjadi 2 (dua) yakni SIMAK-BMN (Sistem Manajemen Akuntansi – Barang Milik Negara) dan SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual).

Pada saat setiap terjadi transaksi atau dapat dikatakan kepemilikan / penambahan aset baru dan adanya barang persediaan petugas SAKPA melakukan rekonsiliasi internal dengan petugas SIMAK –BMN untuk mencocokkan nilai neraca yang ada pada SIMAK – BMN dan SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual) serta setiap bulan melakukan Dekonsiliasi ke KPPN dan semesteran rekonsiliasi ke eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2.3.5.3. Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern merupakan suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam organisasi dengan tujuan untuk menjaga keamanan aset milik organisasi, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi , dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan organisasi.

Pelaksanaan SPI tahun 2021 sesuai pada peraturan Menteri Kelautatan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 29/PERMEN-KP/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan meliputi:

1. Pembentukan Tim;
2. Menyusun Pedoman Umum;
3. Menyusun laporan SPI dan menyamaikan ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Inspektorat Jenderal setiap semester.

2.3.5.4. Manajemen Resiko

Pelaksanaan manajemen resiko di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan merupakan bagian dari kegiatan sistem pengendalian intern yang mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.20/MEN/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang di definisikan sebagai proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah resiko yang mengancam aset dari sebuah organisasi instansi pemerintah yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada instansi pemerintah tersebut.

Implementasinya manajemen resiko ada 2 (dua) tindakan yaitu mencegah dan memperbaiki. Manajemen resiko diterapkan terhadap kegiatan strategis berbasis anggaran dan IKU yang dilaporkan setiap semester ke Direktorat Jendral Perikanan Tangkap dan Inspektorat Jendral Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2.3.6. Kegiatan Kehumasan

Kehumasan Pemerintah mempunyai peran penting dalam membuka ruang bagi publik untuk mendapatkan akses informasi publik. Adanya UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik), merupakan momentum bagi Humas Pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dalam memberikan informasi, penerangan, dan pendidikan kepada masyarakat tentang kebijakan, aktivitas, dan langkah-langkah pemerintah secara terbuka, transparan, jujur dan objektif. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat, termasuk media, bila

tidak akurat, cepat, dan mudah, dapat menyebabkan kebijakan pemerintah dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak informatif. Disinilah tantangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi dalam memperoleh keterbukaan informasi, khususnya menyangkut pelayanan terhadap publik.

Di PPN Kejawanan kegiatan kehumasan berjalan secara rutin, terbukti dengan adanya postingan yang ada di media social, PPN Kejawanan melakukan update secara tentang seluruh kegiatan yang ada di dalam maupun diluar lingkungan PPN Kejawanan. PPN Kejawanan melakukan update kegiatan kehumasan pada akun media social yaitu <https://twitter.com/ppnkejawanan>, <https://www.instagram.com/ppnkejawanan> akun tersebut adalah akun resmi PPN Kejawanan Cirebon.

Ditahun 2021 ada **623** postingan twitter dan **350** postingan Instagram yang di publikasi oleh admin medsos. Beberapa kegiatan yang secara rutin diposting adalah kegiatan operasional, kesyahbandaran, pelayanan publik dan kegiatan eksternal dari pihak lain yang mau mengenal lebih dekat PPN Kejawanan Cirebon.

BAB III

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN

Indikator Kinerja Utama ini merupakan alat ukur keberhasilan kinerja organisasi, sehingga program kerja yang direncanakan akan disesuaikan untuk memberi dukungan IKU sebagaimana dimaksud, serta pada saat implementasi program yang berjalan juga akan lebih efektif dan efisien.

Dengan menggunakan IKU (Indikator Kinerja Utama) sebagai pengukur kinerja untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah dan juga dapat mengukur terwujudnya Visi dan Misi organisasi. Dalam proses pencapaian target IKU yang telah ditentukan perlu memerlukan monitoring dan evaluasi serta mengidentifikasi permasalahan / kendala yang dihadapi.

Oleh karena itu, Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan selaku unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berperan aktif mencari solusi dengan cara meminimalisir permasalahan dalam upaya untuk memenuhi capaian target yang ditentukan. Adapun perkembangan capaian IKU Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan tahun 2021 dapat dilihat pada **lampiran IKU**.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN

4.1. Kedudukan Tugas Dan Fungsi

Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusaha guna mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran.

Sesuai dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan, Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

4.1.1. Fungsi Pemerintahan

Fungsi pemerintahan yaitu fungsi untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan. Serta fungsi lainnya yang terkait dengan pengelolaan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi pemerintahan tersebut meliputi: Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan, Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan, Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan; Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan, Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan, Pelaksanaan kesyahbandaran; Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan, Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan, Tempat publikasi

hasil penelitian kelautan dan perikanan, Pemantauan wilayah pesisir; Pengendalian lingkungan, Kepabeanan, dan/atau keimigrasian.

4.1.2. Fungsi Pengusahaan

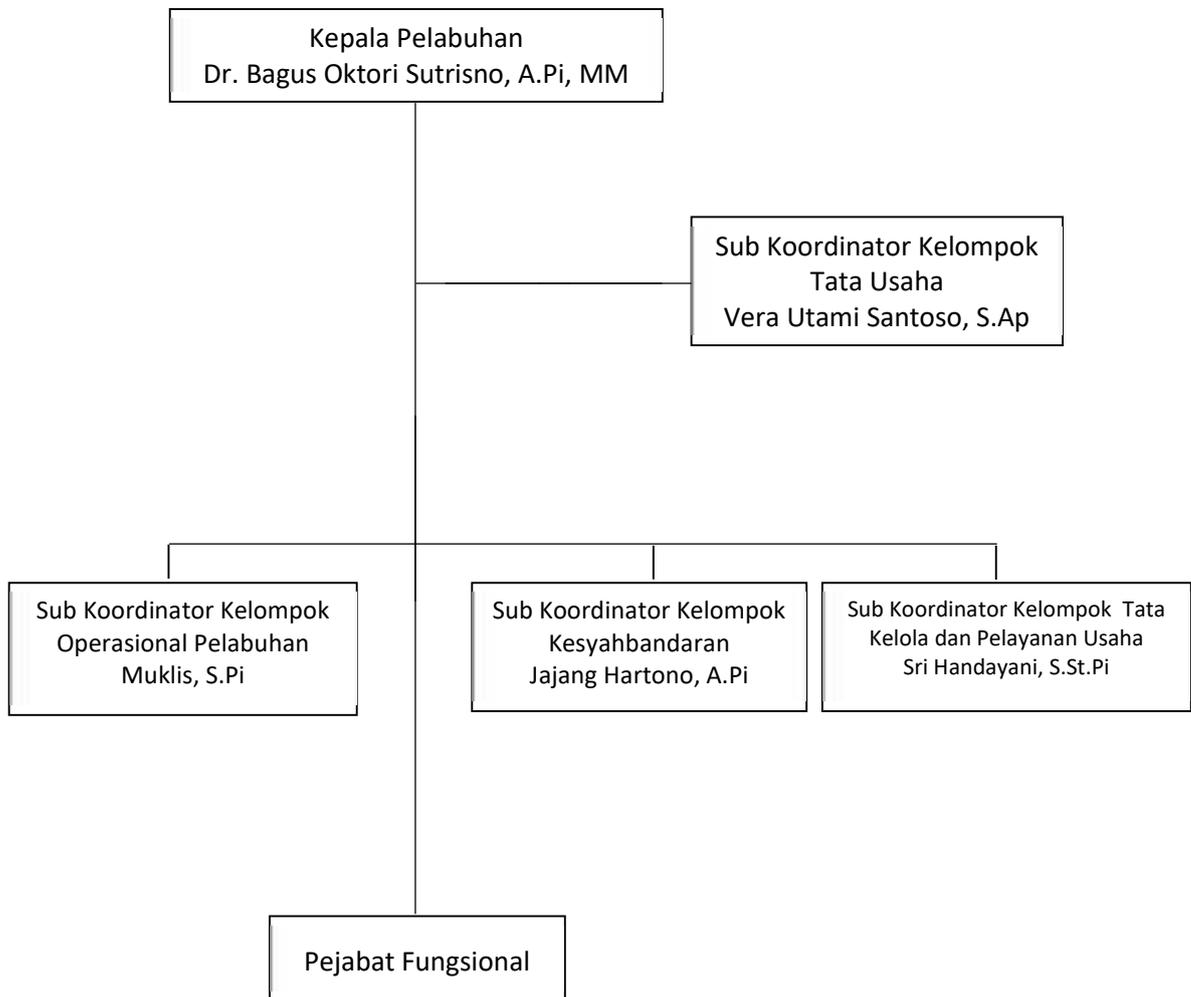
Fungsi pengusahaan yaitu fungsi untuk melaksanakan pengusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di pelabuhan perikanan yang meliputi : Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan; Pelayanan bongkar muat ikan, Pelayanan pengolahan hasil perikanan, Pemasaran dan distribusi ikan, Pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan, Pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan, Pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan; Wisata bahari, dan/atau Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan fungsi tersebut, dengan memperhatikan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), maka pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab masing-masing eselon-I lingkup KKP yang berkaitan dengan kebijakan di daerah secara implisit juga menjadi tugas dan fungsi pelabuhan perikanan.

4.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawatan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan, sebagaimana bagan struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 4.2
Struktur Organisasi PPN Kejawanan
(Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 20/PERMEN-KP/2014)



Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. ini juga merupakan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Dengan tatanan dan pola kerja yang baru Aparatur Sipil Negara (ASN) akan semakin profesional untuk bekerja di bidangnya saat ini.

Walaupun demikian untuk Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan masih mengacu pada Nomor : 20/PERMEN-KP/2014 tanggal 16 Mei 2014 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pelabuhan perikanan, dengan susunan organisasi terdiri dari :

- a. Kepala Pelabuhan Perikanan;
- b. Sub Koordinator Kelompok Tata Usaha;
- c. Sub Koordinator Kelompok Operasional Pelabuhan;
- d. Sub Koordinator Kelompok Kesyahbandaran;
- e. Sub Koordinator Kelompok Tata Kelola dan Pelayanan Usaha;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

4.3. Jumlah Dan Komposisi Pegawai

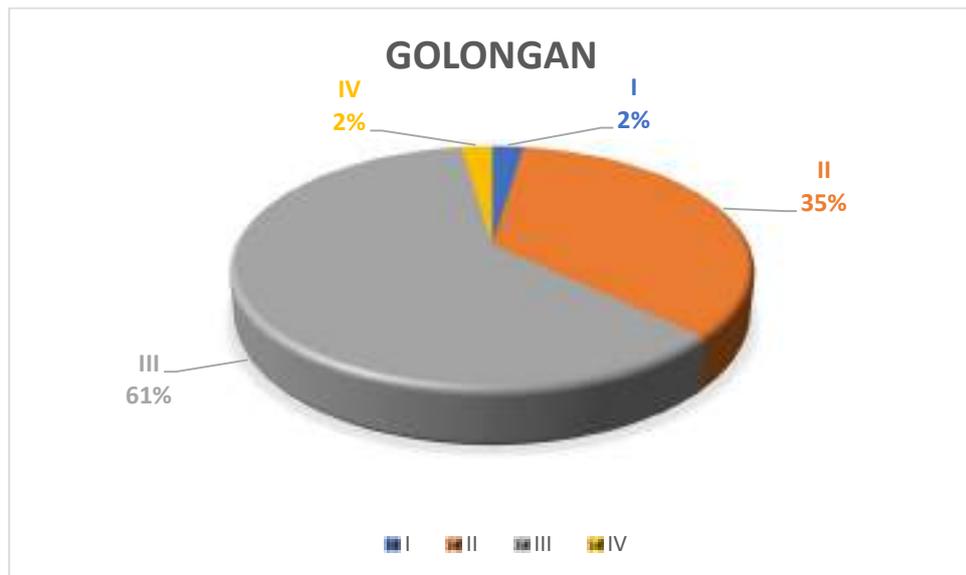
Jumlah pegawai Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sampai dengan akhir tahun 2021 sebanyak **59 orang**, terdiri dari **43 orang ASN**, tenaga kontrak **16 orang**. Komposisi pegawai ASN berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel di bawah.

Tabel 4.3 Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan ASN

NO	JABATAN	GOLONGAN				JUMLAH	PENDIDIKAN							JUMLAH		
		I	II	III	IV		S.3	S.2	S.1/D.IV	D.III	SLTA	SLTP	SD			
	Pejabat Struktural															4
1	Kepala PPN Kejawanan															
2	Subkoordinator Kelompok Tata Usaha (Analisis Pengelola Keuangan APBN - Ahli Muda)			1		1			1							1
3	Subkoordinator Kelompok Tata Kelola dan Pelayanan Usaha (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap - Ahli Muda)			1		1			1							1
4	Subkoordinator Kelompok Operasional Pelabuhan (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap - Ahli Muda)			1		1			1							1
5	Subkoordinator Kelompok Kesyahbandaran (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap - Ahli Muda)			1		1			1							1
	Pejabat Fungsional Umum															25
6	Analisis Tata Laksana			1		1			1							1
7	Pengelola Keuangan			2		2					2					2
8	Pengelola Barang Milik Negara			1		1			1							1
9	Pengadministrasian Persuratan			3		3					3					3
10	Pramubakti	1	3			4					3	1				4
11	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana		1	3		4			2		2					4
12	Teknisi Sarana dan Prasarana		1	1		2					2					2
13	Pengelola Data		1	1	1	3		1	1		1					3
14	Pengadministrasian Data Penyajian dan Publikasi		1			1					1					1
15	Syahbandar Pelabuhan Perikanan			2		2			2							2
16	Analisis Kesyahbandaran			1		1			1							1
17	Pengelola Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan			1		1			1							1
	Pejabat Fungsional Tertentu															14
18	Pranata Komputer - Ahli Muda			1		1			1							1
19	Analisis Pengelola Keuangan APBN – Ahli Pertama			1		1			1							1
20	Pranata Keuangan APBN – Mahir			1		1			1							1
21	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Ahli Pertama)			4		4			4							4
22	Analisis Kepegawaian (Ahli Pertama)			1		1			1							1
23	Pengawas Perikanan (Pelaksana Lanjutan/Mahir)			1		1			1							1
24	Analisis Kepegawaian (Pelaksana/Terampil)		1			1				1						1
25	Pranata Humas (Pelaksana/Terampil)		1			1				1						1
26	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Terampil)		2			2					2					2
27	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Pemula)		1			1					1					1
	Jumlah Total	1	15	26	1	43		1	23	2	16	1				43

Tabel 4.3 Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan Tenaga Kerja Kontrak (TKK)

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	PENDIDIKAN						JUMLAH
		Laki-laki	Perempuan		S.2	S.1/D.IV	D.III	SLTA	SLTP	SD	
1	Pramubakti	6	2	8		6	1	1			8
2	Petugas Kebersihan	6		6				6			6
3	Sopir	2		2				2			2
	Jumlah Total	14	2	16	0	6	1	9	0	0	16



Grafik 4.3.a
Komposisi pegawai ASN berdasarkan golongan/pangkat

Dilihat pada grafik 4.3.a di atas menurut golongannya pegawai PPN Kejawanan terbanyak pada Golongan III mencapai 61%, sedangkan jumlah terkecil Golongan IV dan golongan I sekitar 1% dan Sisanya untuk golongan II ada 35% pegawai ASN sejumlah 43 orang.

Selain pegawai yang tercantum pada grafik 4.3.a di atas, terdapat 16 orang tenaga kerja kontrak dengan presentase 27.12 % dari jumlah keseluruhan Pegawai PPN Kejawanan untuk menangani kebersihan dan keamanan serta tenaga administrasi di pelabuhan perikanan.



Grafik 4.3.b
Jumlah Pegawai ASN & TKK Menurut pendidikan

Jumlah pegawai ASN dan TKK menurut tingkat pendidikan : tingkat pendidikan SD sebanyak 0 orang (0%), tingkat pendidikan SLTP sebanyak 1 orang (2%), tingkat pendidikan SLTA sebanyak 26 orang (44%), tingkat pendidikan D III (Diploma) sebanyak 3 orang (5%), tingkat pendidikan S1 (Sarjana) dan D IV sebanyak 28 orang (47%), tingkat pendidikan S2 sebanyak 1 orang (2%). Dan jika dilihat dari presentase menurut tingkat pendidikan pegawai ASN dan TKK PPN Kejawanan terbanyak pada tingkat pendidikan S1/D4 mencapai 47 %, sedangkan jumlah terkecil pada tingkat pendidikan SLTP sekitar 2%.

4.4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Untuk meningkatkan profesionalisme pegawai pelabuhan, beberapa pegawai Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan telah diikutsertakan dalam kegiatan pengembangan profesionalisme pegawai baik berupa kursus, sosialisasi, bimtek pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap maupun dari instansi terkait lainnya untuk meningkatkan kinerja individu maupun organisasi.

4.5. Kenaikan Pangkat Pegawai

Kenaikan pangkat pegawai pada tahun 2021 merupakan kenaikan pangkat pilihan yang merupakan kenaikan pangkat ASN regular setiap 4 tahun sekali dan sebanyak 13 orang pegawai yang naik pangkat di tahun 2021 yaitu sebanyak 7 orang pegawai yang naik pangkat di Bulan April dan 6 orang pegawai yang naik pangkat di Bulan Oktober. Adapun daftar nama pegawai yang memperoleh kenaikan pangkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Periode April dan Oktober dapat dilihat pada **lampiran 4.5**.

4.6. Kenaikan Gaji Berkala

Kenaikan gaji berkala adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala yaitu setiap 2 (dua) tahun sekali serta telah menenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2021 ada 21 pegawai ASN yang mendapatkan kenaikan gaji berkala, kenaikan gaji berkala ini merupakan salah satu perhatian pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara. Adapun daftar pegawai yang memperoleh kenaikan gaji berkala di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan tahun 2021 dapat dilihat pada **lampiran 4.5**.

4.7. Usia Pensiun

Dalam menjalankan tugasnya ASN akan berhenti secara terhormat yang salah satunya karena telah mencapai batas usia tertentu sesuai peraturan yang berlaku. Ditahun 2021 ini, ASN yang telah mencapai batas usia pensiun di tahun 2021 sebanyak 4 pegawai yaitu :

1. **Chasanah** menjabat sebagai Pengadministrasi Keuangan dengan pangkat terakhir III/a.
2. **Yamin Hermanto** menjabat sebagai Analis Tata Laksana dengan pangkat terakhir III/d.
3. **Setiawan** menjabat sebagai Pengelola Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan dengan pangkat terakhir III/a.
4. **Heri Supriatna** menjabat sebagai Statistisi Penyelia dengan pangkat terakhir III/c.

Ditahun 2021 ini, ASN yang wafat/meninggal dunia sebanyak 2 pegawai yaitu :

1. **Goni Suyanto** menjabat sebagai Pengelola Layanan Operasional dengan pangkat terakhir III/a.
2. **Agus Juanedi** menjabat sebagai Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi dengan pangkat terakhir II/d.

4.8. Mutasi Pegawai

Ditahun 2021 terdapat pegawai yang mutasi dari luar PPN Kejawanan ke PPN Kejawanan atau sebaliknya sebanyak 6 orang pegawai yaitu:

No.	Nama	Instansi Asal / Jabatan Lama	Instansi Tujuan / Jabatan Baru
1.	Dr Bagus Oktor Sutrisno, A.Pi, M.M.	PPN Kejawanan/ Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	PPS Nizam Zachman/ Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman
2.	Udin Casrudin, S.E, M.M	Pusdik KP/ Analis Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan	PPN Kejawanan/ Pengelola Data
3.	Jajang Hartono, A.Pi	PPN Kejawanan/ Pengelola Produksi	PPN Pekalongan/ Pengelola

		Perikanan Tangkap – Ahli Muda	Produksi Perikanan Tangkap – Ahli Muda
4.	Rakim, S.St.Pi	PPN Pekalongan/ Pengelola Produksi Perikanan Tangkap – Ahli Muda	PPN Kejawatan/ Pengelola Produksi Perikanan Tangkap – Ahli Muda
5.	Tobing Sutomo, A.Pi	PPN Kejawatan/ Syahbandar Pelabuhan Perikanan PP Blanakan	PPN Kejawatan/ Syahbandar Pelabuhan Perikanan PP Karangsong
6.	Jamaludin, S.Pi	PPN Kejawatan/ Syahbandar Pelabuhan Perikanan PP Karangsong	PPN Kejawatan/ Syahbandar Pelabuhan Perikanan PP Blanakan

Tabel 4.8. mutasi pegawai PPN Kejawatan

4.9. Mutasi Jabatan

Selain mutasi pegawai dari luar PPN Kejawatan ke PPN Kejawatan atau sebaliknya, juga terdapat pegawai yang mengalami mutasi jabatan yaitu:

No.	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1.	Asep Saefulloh Hidayat	Pengadministrasi Keuangan	Pengelola Keuangan
2.	Cucu Sukarya	Teknisi Sarana dan Prasarana	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Terampil
3.	Dani Kusmardani, S.I.P	Pengadministrasi Barang Milik Negara	Pengelola Barang Milik Negara
4.	Dede Casidi	Pengelola Persuratan	Pengadministrasi Persuratan
5.	Dewi Dasmmyati, S.Pi	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Pengelola Data
6.	Edi	Petugas Kebersihan Kawasan	Pramu Bakti
7.	Eva Hermawanto	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana
8.	Herry Supangat	Pengadministrasi Keuangan	Pengelola Keuangan
9.	Iwan	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Pengelola Data

10.	Johan Panduwijaya, S.Pi	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama
11.	Jono	Petugas Kebersihan Kawasan	Pramu Bakti
12.	Muhammad Farhan Masykur, S.E	Analisis Perencanaan	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama
13.	Muslimin	Pengelola Layanan Operasional	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi
14.	Rizky Widiyanto, S.T	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana
15.	Rudiyanto	Petugas Kebersihan Kawasan	Pramu Bakti
16.	Sri Mariono, S.E	Pengadministrasi Kepegawaian	Analisis Tata Laksana
17.	Sri Retnowati, S.H	Bendahara	Pranata Keuangan APBN Mahir
18.	Sukenda	Pengelola Layanan Operasional	Teknisi Sarana dan Prasarana
19.	Suryano	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Terampil
20.	Susanto, S.Pi	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana
21.	Syamrudin, S.St.Pi	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Pengelola Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan
22.	Tamrin	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana
23.	Tarsih	Pengelola Persuratan	Pengadministrasi Persuratan
24.	Toto Suprpto	Pengelola Persuratan	Pengadministrasi Persuratan
25.	Warmadi	Pengelola Layanan Operasional	Teknisi Sarana dan Prasarana

Tabel 4.9. tabel mutasi jabatan PPN Kejawanan

BAB V

OPERASIONAL PELABUHAN

5.1. Operasional Kesyahbandaran

Untuk menjaga keselamatan operasional pelayaran kapal perikanan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan menempatkan Syahbandar di pelabuhan perikanan.

Pada tahun 2021, pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran telah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan wewenang Syahbandar di pelabuhan perikanan. Pada tahun 2021 telah dilaksanakan kegiatan kesyahbandaran sebagai berikut:

1. Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
2. Memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan;
3. Memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan, memeriksa alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan;
4. Memeriksa *log book* penangkapan dan pengangkutan ikan;
5. Mengatur olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan di pelabuhan;
6. Mengawasi pengisian bahan bakar untuk kapal-kapal perikanan;
7. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan, yaitu pemeliharaan alur / kolam pelabuhan dan rehabilitasi breakwater;
8. Memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan;
9. Pelayanan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI);
10. Menerbitkan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan (STBLKK) kapal perikanan ;
11. Pendaftaran asuransi nelayan ; dan

12. Pengesahan Perjanjian Kerja Laut (PKL).



Gambar 5.1. Berbagai Kegiatan Pelayanan Kesyahbandaran di PPN Kejawanan

5.1.1. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.3/PERMEN-KP/2013 Tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan, SPB adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, laik tangkap dan laik simpan.

Sejak bulan Oktober 2015, SPB diproses dan diterbitkan secara *online*. Sejak tahun 2019, pelayanan penerbitan SPB dilaksanakan melalui aplikasi yang telah dimutakhirkan, yaitu aplikasi Teman SPB. Aplikasi ini mengakomodir pelayanan penerbitan SPB terhadap kapal berizin pusat maupun daerah. Aplikasi Teman SPB memuat data Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan (STBLKK) kapal perikanan, kegiatan kapal selama berada di pelabuhan, perbekalan kapal,

penerbitan SPB, hingga pencabutan SPB. Apabila sistem *error* pada aplikasi, maka pelayanan penerbitan SPB dapat dilakukan secara manual (*offline*).



Gambar 5.1.1.a. Alur Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Bagan alur di atas adalah pola pelayanan penerbitan SPB sebelum diberlakukannya aplikasi TemanSPB versi baru yang mulai berlaku sejak 1 Maret 2021. Dalam aplikasi Teman SPB versi baru ini, permohonan penerbitan SPB dilakukan oleh Nakhoda/Pemilik/Pengurus Kapal melalui online dengan cara menginput informasi dan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Salah satu dokumen yang harus diinput yaitu bukti pembayaran pemenuhan PNB/PAD, yang mana merupakan dokumen bukti yang menyatakan bahwa kapal yang bersangkutan telah memenuhi tagihan PNB/PAD selama kapal tersebut bertambat dan/atau berlabuh di kolam PPN Kejawan. Hal ini terkait erat dengan mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian

Kelautan dan Perikanan sejak 18 September 2021. Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini memang melalui tahap perhitungan, keluarnya *billing* hingga pembayaran pada Sub Koordinator Kelompok Tata Kelola dan Pelayanan Usaha (TKPU) namun Sub Koordinator Kesyahbandaran dalam hal ini melaksanakan fungsi kontrol terhadap terpenuhinya dokumen.



Gambar 5.1.1.b. Tampilan Upload Dokumen pada Teman SPB

Sehingga, setelah permohonan SPB diajukan, Petugas Kesyahbandaran/Syahbandar dapat memverifikasi kebenaran informasi dan dokumen yang dilampirkan pada permohonan penerbitan TemanSPB oleh Nakhoda/Pemilik/Pengurus Kapal dengan cara memeriksanya dengan dokumen kapal dan permohonan penerbitan SPB yang diserahkan ke kantor Kesyahbandaran PPN Kejawanan. Setelah proses verifikasi, selanjutnya adalah validasi yang hanya dapat dilakukan oleh akun Syahbandar.

SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR

2021



Tren peningkatan

Penerbitan SPB pada tahun 2021 mengalami peningkatan 4,2% apabila dibandingkan dengan data tahun 2020.

Surat Persetujuan Berlayar

adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan Pelabuhan Perikanan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan kelayahtan kapal, laik tangkap, dan laik simpan.

Daerah Penangkapan Ikan

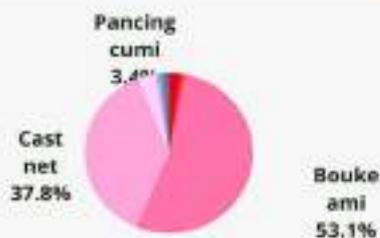
Kapal-kapal yang berlayar dari PPN Kejawanan melakukan operasi penangkapan ikan di WPPNRI 572, 573, 711, 712, 713 dan 718.



PENERBITAN SPB BERDASARKAN UKURAN KAPAL

Dari 622 unit kapal yang berangkat dari PPN Kejawanan pada tahun 2021, kapal dengan ukuran > 31 GT mendominasi dengan 335 unit (53,8%).

Nelayan
Nelayan kapal yang berlayar dari PPN Kejawanan merupakan Nelayan pendatang, yang mayoritas bukanlah penduduk asli Cirebon. Nelayan berasal dari berbagai daerah.



Alat penangkapan ikan

Keberangkatan kapal 2021 berdasarkan jenis alat penangkapannya didominasi oleh bouke ami (330 unit), cast net (235 unit) dan pancing cumi (21 unit).

@ppnkejawanan

Jumlah SPB yang diterbitkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan tahun 2021 sebanyak 622 lembar. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 4,2% dibandingkan dengan SPB yang terbit pada tahun 2020 dengan jumlah 597 lembar.

Jumlah rata-rata SPB pada tahun 2021 yang diterbitkan per bulannya yaitu sejumlah 51 lembar. Peningkatan jumlah penerbitan SPB ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah kapal domisili PPN Kejawanan yang meningkat dari 254 unit pada tahun 2020 menjadi 257 unit pada tahun 2021, atau mengalami peningkatan 1,2%.

Jumlah SPB tertinggi yang diterbitkan pada tahun 2021 terjadi pada bulan Maret, dengan 94 lembar. Jumlah ini adalah 15,1% dari total jumlah penerbitan SPB pada tahun 2021.

Berdasarkan jenis alat penangkapannya, yang dominan dari kapal yang telah terbit SPBnya adalah jenis alat penangkap ikan bouke ami sebanyak 330 lembar, yakni 53,1% dari total jumlah SPB yang diterbitkan pada tahun 2021. Jenis alat penangkapan ikan dengan SPB terendah yang terbit pada tahun 2021 yakni purse seine pelagis besar dengan frekuensi penerbitan SPB sebanyak 5 kali atau 0,8% dari jumlah total SPB tahun 2021.

GT	Jenis API									Jumlah
	Bouke ami	Cast net	Pancing cumi	Gill net liong bun	Purse seine pelagis kecil	Purse seine pelagis besar	Gill net oseanik	Jaring insang	Lain-lain	
≥1 - 10 GT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
>10 - 20 GT	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
>20 - 30 GT	279	3	0	0	0	0	0	0	4	286
>30 - 60 GT	17	46	3	0	0	0	0	0	0	66
>60 - 100 GT	34	186	16	14	0	0	5	0	0	255
>100 - 200 GT	0	0	2	0	6	5	1	0	0	14
> 200 GT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	330	235	19	14	6	5	6	0	5	622

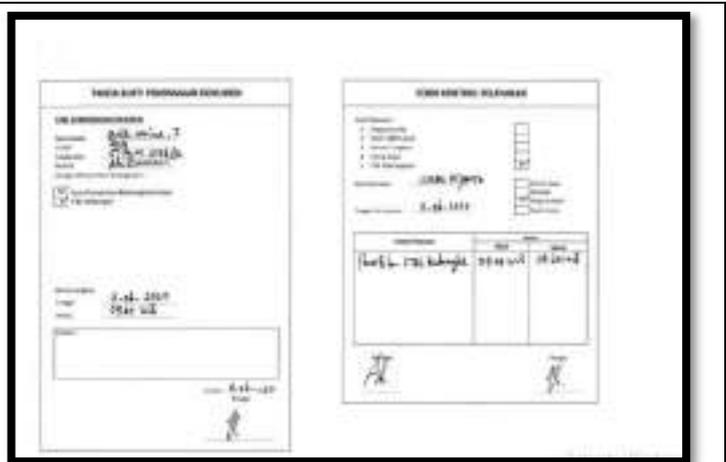
Tabel 5.1.1. Rekapitulasi Keberangkatan Kapal Perikanan di PPN Kejawan

Berdasarkan ukuran kapal, klasifikasi kapal perikanan >20 - 30 GT adalah yang banyak pada seluruh jenis API, yakni 45,9% dari total SPB yang terbit pada tahun 2021. API jenis lain-lain yang dimaksud adalah kapal perikanan baru yang belum dilengkapi dengan alat penangkap ikan. Kapal perikanan jenis lain-lain yang SPB nya terbit dari PPN Kejawan tersebut bukan merupakan kapal domisili di PPN Kejawan dan biasanya hanya melakukan aktivitas doking di PPN Kejawan kemudian kembali ke pelabuhan asalnya, atau dalam beberapa kasus adalah kapal baru yang belum dilengkapi dengan alat penangkap ikan dan berlayar menuju pelabuhan lain.

Pelayanan penerbitan SPB di PPN Kejawanan telah memiliki predikat ISO 9001-2015 dan menjadi salah satu pelayanan prioritas pada Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM. Sehingga telah menerapkan SOP dan adanya instrumen kontrol berupa kartu kendali pelayanan.



Gambar 5.1.1.c. Sertifikat ISO 9001: 2015



Gambar 5.1.1.d. Kart kendali STBL Keberangkatan Kapal

5.1.2. Asuransi nelayan mandiri

Asuransi Nelayan merupakan salah satu poin dalam Perjanjian Kerja Laut, dimana hal ini merupakan implementasi dari Hak Asasi Manusia (HAM) di bidang perikanan. Bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cirebon, PPN Kejawanan telah melaksanakan pendaftaran asuransi nelayan sejak tahun 2018 sampai dengan 30 Desember 2021 terhadap 18.776 orang Nelayan dari 1.492 kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan. Jumlah Nelayan yang terdaftar asuransi nelayan mandiri selama tahun 2021 didominasi 58,1% oleh kapal dengan ukuran ≥ 31 GT (3.185 orang). Demikian pula data dari tahun 2018 hingga 2021 menunjukkan 12.156 orang (64,9% dari jumlah total) adalah kapal yang berukuran ≥ 31 GT.

Jumlah kapal yang terdaftar asuransi nelayan mandiri pada tahun 2021 didominasi 55,2% oleh kapal dengan ukuran ≥ 31 GT. Sedangkan data 2018 sampai dengan akhir 2021 menunjukkan bahwa 923 unit kapal (61,8% dari jumlah total) adalah kapal yang berukuran ≥ 31 GT. Dengan total premi/iuran Rp. 16.800 pertrip, Nelayan sudah mendapatkan fasilitas dari Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.



5.1.3. Frekuensi kunjungan kapal perikanan

Nakhoda dari kapal-kapal yang berkunjung ke PPN Kejawanan wajib melapor ke Petugas Kesyahbandaran Perikanan yang berada di Gedung Pelayanan Kesyahbandaran untuk melaporkan e-logbook penangkapan ikan dan penerbitan STBL Kedatangan kapal perikanan. Kapal-kapal yang berkunjung ke PPN Kejawanan terdiri atas kapal-kapal yang berkunjung untuk mengisi perbekalan, kapal-kapal yang datang karena terjadi kerusakan teknis pada kapalnya, kapal yang hendak melakukan *docking*, kapal-kapal yang memang berpangkalan/berdomisili di PPN Kejawanan dan melakukan pendaratan hasil tangkapan ikan, serta kapal-kapal yang berlindung saat gelombang besar sehingga berlabuh di PPN Kejawanan.



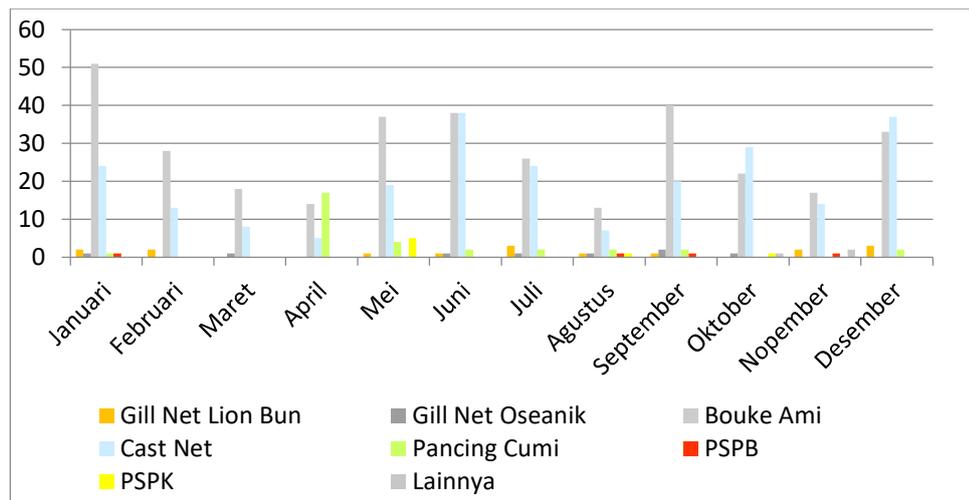
Gambar 5.1.3. Kegiatan Kapal Perikanan yang Berkunjung ke PPN Kejawanan

GT	Jenis API								Jumlah
	Bouke ami	Cast net	Pancing cumi	Gill net liong bun	Purse seine pelagis kecil	Purse seine pelagis besar	Gill net oseanik	Lain-lain	
≥1 - 10 GT	0	0	0	0	0	0	0	1	1
>10 - 20 GT	0	0	0	0	0	0	0	1	1
>20 - 30 GT	273	5	2	0	0	0	1	1	282
>30 - 60 GT	16	53	5	0	0	0	0	0	74
>60 - 100 GT	48	180	23	16	2	0	6	0	275
>100 - 200 GT	1	0	2	0	5	4	1	0	12
> 200 GT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	337	238	32	16	7	4	8	3	645

Tabel 5.1.3. Rekapitulasi Kunjungan Kapal Perikanan di PPN Kejawanan Tahun 2021

Frekuensi kunjungan kapal pada tahun 2021 yaitu 645 kali. Jumlah ini mengalami peningkatan 3,2% dibandingkan dengan frekuensi kunjungan kapal pada tahun 2020 dengan jumlah kunjungan 625 kali. Hal ini dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah kapal domisili PPN Kejawanan pada tahun 2021. Selain itu, karena jumlah kapal domisili PPN Kejawanan yang memiliki ukuran ≤ 30 GT bertambah menjadi 43,6% pada tahun 2021, menyebabkan wilayah operasi penangkapan ikan kapal-kapal ini menjadi lebih terbatas pada daerah yang dekat sehingga frekuensi kapal kembali ke pelabuhan meningkat.

Frekuensi kunjungan kapal berdasarkan jenis alat penangkap ikan pada tahun 2021 masih didominasi oleh kapal dengan alat penangkap ikan bouke ami yakni sejumlah 337 kali kunjungan atau 52,2% dari total jumlah kunjungan kapal pada tahun 2021. Jumlah tersebut mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan jumlah kunjungan tertinggi pada tahun 2020 dengan alat penangkapan ikan bouke ami (sebanyak 393 kali). Hal ini disebabkan oleh bergantinya jenis Alat Penangkap Ikan dan ukuran kapal setelah dilakukan pengukuran ulang kapal.



Grafik 5.1.3. Grafik Kunjungan Kapal PPN Kejawan 2021

Berdasarkan klasifikasi ukuran GT, frekuensi kunjungan kapal tertinggi di PPN Kejawan selama tahun 2021 diketahui 43,7% nya adalah kapal dengan ukuran >20 - 30 GT. Kemudian 42,6% kunjungan kapal pada tahun 2021 adalah kapal dengan ukuran >60 - 100 GT Frekuensi kunjungan kapal tertinggi terjadi pada bulan Januari dan Juni yaitu masing-masing 80 kali (12,4% dari total kunjungan kapal tahun 2021) hal ini karena banyak kapal datang setelah trip penangkapan ikan ketiga tahun 2020 dan kedatangan setelah trip pertama tahun 2021. Sedangkan frekuensi kunjungan terendah terjadi pada bulan Maret yakni 27 kali atau 4,2% dari total kunjungan tahun 2021, hal ini karena pada bulan Maret adalah waktu kapal-kapal memulai trip pertama operasi penangkapan ikan pada tahun 2021 .

Jumlah kapal yang mendaratkan hasil tangkapan (kegiatan bongkar) pada tahun 2021 yakni 548 kali, mengalami peningkatan 24,3% dibandingkan jumlah kapal yang melakukan kegiatan bongkar pada tahun 2020 yang sejumlah 415 kali. Berdasarkan data yang telah terhimpun, diketahui bahwa perbandingan antara jumlah kapal masuk, kapal bongkar dan jumlah *Log Book* Penangkapan Ikan (LBPI) tidaklah selalu berbanding lurus. Jumlah persentasi kapal bongkar yakni

83,9% dari jumlah total kunjungan kapal pada tahun 2021. Terdapat perbedaan tujuan kapal yang masuk ke PPN Kejawanan, tidak seluruhnya memiliki kepentingan untuk bongkar. Beberapa kapal masuk ke PPN Kejawanan untuk pengisian perbekalan, terjadi hal teknis seperti perbaikan mesin dan berlindung dari cuaca buruk.

5.1.4. Log Book Penangkapan Ikan (LBPI)

Logbook Penangkapan Ikan berperan sebagai instrumen pendugaan stok ikan (stock assesment) dan penelusuran penangkapan (traceability) sehingga logbook penangkapan ikan bisa berfungsi sebagai upaya pencegahan kapal penangkap ikan melakukan IUU fishing. Berdasarkan PERMEN KP No.PER.18/MEN/2010 tentang Logbook Penangkapan Ikan, bahwa setiap kapal penangkapan ikan yang memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) wajib mengisi Logbook Penangkapan Ikan.

Hal ini dicantumkan pula dalam Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor: 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Penangkapan Ikan di WPP-NRI sebagaimana telah diubah terakhir juga sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 33/PERMEN-KP/2021, disebutkan bahwa setiap orang untuk memiliki SIPI harus melampirkan surat pernyataan bermaterai kesanggupan mengisi Logbook Penangkapan Ikan.



Gambar 5.1.4 Kegiatan evaluasi dan aktivasi e – logbook penangkapan ikan

PPN Kejawanen sebagai salah satu pelabuhan pangkalan kapal perikanan mengimplementasikan Logbook Penangkapan Ikan dalam kegiatan operasionalnya. Kegiatan pendataan Logbook Penangkapan Ikan yang dilaksanakan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen meliputi kegiatan verifikasi data melalui aplikasi Sistem Informasi Logbook Penangkapan ikan (SILOPI) yang kini telah diperbarui dan bisa diakses serta diisi secara elektronik oleh Nakhoda kapal perikanan melalui aplikasi E – Logbook Penangkapan Ikan. sehingga, Petugas Syahbandar maupun Syahbandar dapat memverifikasi, memvalidasi, melakukan pengolahan dan analisis data dari apa yang telah Nakhoda kirimkan tersebut.

Aplikasi E – Logbook Penangkapan Ikan adalah salah satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dari pengisian Logbook Penangkapan Ikan secara manual. Sejak Oktober tahun 2018, PPN Kejawanen telah melaksanakan aktivasi dan aktivitas pelaporan kegiatan penangkapan ikan melalui

aplikasi E – Logbook Penangkapan Ikan. Aplikasi yang diinstal di ponsel ini, dapat menyimpan data penangkapan ikan mulai dari data daerah penangkapan ikan, jenis hasil tangkapan, jumlah hasil tangkapan, berapa kali proses setting dilakukan hingga lamanya waktu penangkapan ikan yang dilakukan dalam satu trip operasi penangkapan ikan.

No.	Bulan	Logbook Penangkapan Ikan		Jumlah total (lembar)	PIPP		Jumlah total (lembar)
		≤ 30 GT	≥ 31 GT		≤ 30 GT	≥ 31 GT	
1	Januari	32	34	66	34	36	70
2	Februari	15	18	33	21	17	38
3	Maret	8	8	16	9	10	19
4	April	5	15	20	6	24	30
5	Mei	21	31	52	23	34	57
6	Juni	25	41	66	27	43	70
7	Juli	20	25	45	23	27	50
8	Agustus	8	7	15	9	7	16
9	September	27	23	50	32	23	55
10	Oktober	12	29	41	15	32	47
11	November	12	19	31	13	18	31
12	Desember	26	40	66	28	37	65
Jumlah		211	290	501	240	308	548

Tabel. 5.1.4. Rekapitulasi Jumlah LBPI di PPN Kejawatan Tahun 2021

Adapun jumlah Logbook Penangkapan Ikan yang terdata dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap melalui Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawatan pada tahun 2021 sejumlah 501 berkas. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 11,3% apabila dibandingkan dengan Logbook Penangkapan Ikan pada tahun 2020 yang berjumlah 450 berkas. Hal ini menandakan kesadaran Nakhoda Kapal dalam menunaikan kewajibannya menyampaikan data Logbook Penangkapan Ikan telah meningkat.



Jumlah Logbook Penangkapan Ikan yang diterima pada tahun 2021 adalah 501 berkas atau 92,6% dari jumlah total kapal bongkar (541 unit). Hal ini menjadi prestasi bagi Petugas di Sub Koordinator Kelompok Kesyahbandaran, karena merupakan bukti atas kinerja. Pada tahun 2021 pula, PPN Kejawan telah menempati peringkat pertama di antara Pelabuhan Perikanan seluruh Indonesia yang dalam hal kepatuhan pelaporan logbook penangkapan ikan berdasarkan penilaian kepatuhan logbook penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan oleh Direktorat Sumberdaya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan tingkat kesesuaian antara data ikan hasil

tangkapan yang diinput pada aplikasi E – Logbook Penangkapan Ikan dengan data pendaratan ikan dari kapal – kapal yang melakukan kegiatan pendaratan ikan

di dermaga PPN Kejawan, diperoleh data seperti tabel di atas. Dengan rata-rata persentase 74,65% sesuai pada seluruh data logbook penangkapan ikan yang masuk, diketahui bahwa 64,2% sesuai pada kapal dengan ukuran ≤ 30 GT dan 85,1% sesuai pada kapal dengan ukuran ≥ 31 GT. Tingkat kesesuaian 85,1% pada kapal dengan ukuran ≥ 31 GT ini dapat dikatakan data sangat baik karena diperoleh dari 94,2% keakuratan data (dari 308 unit kapal dengan ukuran ≥ 31 GT yang melakukan pendaratan ikan, 290 unit nya melaporkan logbook penangkapan ikan).

5.1.5. Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan (STBLKK) Kapal Perikanan

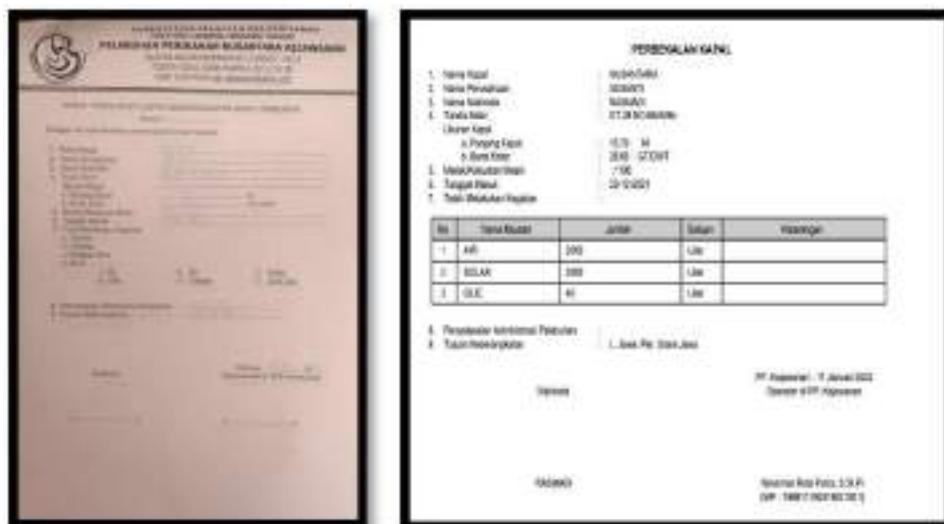
Dalam pengaturan lalu lintas dan proses tambat labuh kapal perikanan di kolam pelabuhan, kapal perikanan yang hendak masuk ke pelabuhan perikanan diwajibkan melaporkan rencana kedatangannya kepada Syahbandar minimal 2 jam sebelum memasuki area pelabuhan. Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan (STBLKK) kapal perikanan terbit setelah dokumen-dokumen kapal perikanan dinyatakan lengkap dan sah. Setiap kapal yang datang dan berangkat ke pelabuhan perikanan wajib menyampaikan dokumen kapal untuk pencatatan. Jumlah STBLKK kedatangan pada tahun 2021 yakni 645 lembar. Apabila dibandingkan dengan STBLKK kedatangan pada tahun 2020 yaitu sebanyak 625 lembar, mengalami peningkatan sebanyak 3,2%. Penerbitan STBL kedatangan mencapai persentase 100% dengan jumlah kunjungan kapal perikanan pada tahun 2021.



Gambar 5.1.5.a. Alur Pelayananan Penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBL Kedatangan)

Jumlah STBLKK keberangkatan tahun 2021 yaitu sejumlah 186 dokumen atau 29,9% dari SPB yang diterbitkan. Hal ini terjadi karena berdasarkan Surat dari Direktur Kepelabuhanan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada tanggal 08 Februari 2021 tentang Penerapan Sistem Informasi Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Teman SPB) yang di dalamnya disebutkan bahwa pada tanggal 01 Maret 2021 penerpaan Sistem Informasi Teman SPB yang telah diperbaharui telah diaktifkan menggantikan Teman SPB yang sudah ada sebelumnya. Perbedaan dari Teman SPB versi lama, pada Teman SPB yang baru yaitu dokumen permohonan penerbitan SPB dan STBL Kedatangan Kapal diinput secara mandiri oleh pemilik kapal / penanggung jawab kapal. Sehingga, Petugas Kesyahbandaran dapat memverifikasi dokumen yang telah diinput oleh pemilik kapal / penanggung jawab kapal saja. Namun pada prakteknya, dokumen kapal asli tetap wajib disampaikan kepada Petugas Kesyahbandaran agar proses

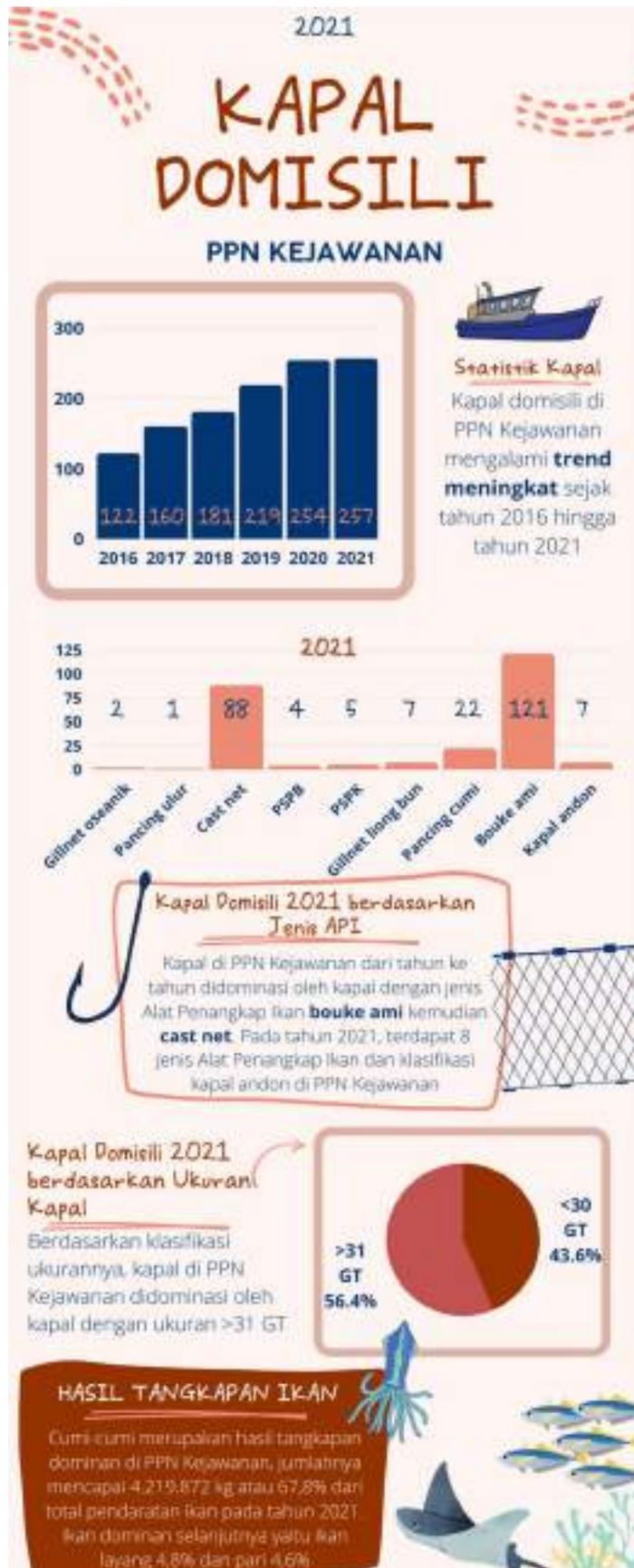
verifikasi dokumen lebih sah. Selain itu, perbedaan yang signifikan adalah tidak adanya STBL Keberangkatan dalam fitur aplikasi Teman SPB versi baru ini, melainkan langsung ke tahap permohonan penerbitan SPB. Fitur baru TemanSPB ini memiliki makna yang sama dengan STBL keberangkatan sebagai alat bukti bahwa kapal sudah bebas dari urusan kepelabuhanan agar kemudian dapat diterbitkan pula Surat Persetujuan Berlayar (SPB) oleh Syahbandar. STBL Keberangkatan digantikan dengan PERBEKALAN KAPAL dan esensi dari STBL Keberangkatan itu sendiri terkandung dalam PERBEKALAN KAPAL. Secara implisit, informasi yang tercakup dalam Perbekalan Kapal sama STBL Keberangkatan Kapal. Dalam STBL Keberangkatan Kapal lebih detail karena satuan dan jumlah (volume) masing-masing perbekalan dicantumkan. Informasi ini yang menjadi data perbekalan kapal harian di Pelabuhan Perikanan.



5.1.5.b. Gambar STBL Keberangkatan dan Perbekalan Kapal Teman SPB

5.1.6. Perkembangan Alat Penangkap Ikan (API)

Kapal domisili PPN Kejawatanan mengalami kenaikan jumlah dan jenis Alat Penangkap Ikan (API) yang digunakan, dari 254 unit pada tahun 2020 menjadi



257 unit pada tahun 2021, atau mengalami peningkatan 1,2%. Jenis API bouke ami merupakan jenis alat penangkap ikan dominan, dengan jumlah 121 unit (47,1% dari total kapal domisil PPN Kejawanan tahun 2021). Namun, jumlah bouke ami pada tahun 2021 mengalami penurunan 11% apabila dibandingkan dengan bouke ami pada tahun 2020 yang berjumlah 136 unit. Berdasarkan klasifikasi ukuran, kapal domisili PPN Kejawanan 56,4% nya adalah kapal dengan ukuran ≥ 31 GT. Kondisi ini berbeda dari tahun 2020, dimana kapal yang mendominasi adalah kapal yang berada pada range >20-30 GT dan mendominasi sebanyak 43% (110 unit kapal).

5.1.7. Jasa Pengisian Perbekalan Kapal

Perbekalan kapal perikanan merupakan kelengkapan yang harus terpenuhi untuk operasional penangkapan ikan. Perbekalan untuk kapal perikanan mencakup BBM, air tawar bersih, bahan makanan, es dan umpan. Namun es bukan merupakan konsumsi untuk perbekalan kapal perikanan di PPN Kejawatanan karena kapal-kapal perikanan di PPN Kejawatanan sudah dilengkapi dengan freezer sehingga tidak membutuhkan es untuk menjaga kualitas ikan hasil tangkapan. Begitu pula dengan umpan, API yang digunakan kapal-kapal perikanan di PPN Kejawatanan yaitu bouke ami, gillnet liong bun, gillnet oseanik, dan purse seine tidak memanfaatkan umpan.

a) Penyaluran Air Tawar Bersih

Di dalam kapal perikanan memerlukan air bersih untuk memenuhi kebutuhan Awak Kapal Perikanan, dari kebutuhan minum, memasak, hingga mandi. PPN Kejawatanan menyediakan jasa pengisian air tawar bersih untuk kapal perikanan. Jumlah air tawar bersih yang disalurkan di PPN Kejawatanan pada tahun 2021 sebanyak 6.743.000 liter, atau mengalami penurunan 0,6% apabila dibandingkan dengan penyaluran air pada tahun 2020 sebanyak 6.783.000 liter. Pada tahun 2021 tercatat 572 kali pelayanan jasa pengisian perbekalan air bersih dilaksanakan. Jumlah ini mengalami penurunan 0,3% dari jumlah kapal yang melakukan pengisian air pada tahun 2020 (sebanyak 574 kapal).



Gambar 5.1.7.a. Pengisian Perbekalan Air Bersih

b) Perbekalan Bahan Makanan

Perbekalan bagi kapal-kapal yang hendak melaut mencakup keperluan pangan Awak Buah Kapal (ABK), bahan bakar minyak dan stok air tawar bersih. Keperluan perbekalan untuk melaut bagi kapal-kapal perikanan, khususnya bahan pangan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan perkapalnya sebagian besar diperoleh dari luar kawasan pelabuhan dan selama ini telah difasilitasi oleh pemilik atau pengurus kapal.



Gambar 5.1.7.b. Pengisian perbekalan makanan

c) Bahan Bakar Minyak (BBM)

PPN Kejawanan melayani pengisian BBM subsidi dan non subsidi untuk kapal perikanan. Sejak bulan November 2019 dilaksanakan pasar bebas di PPN Kejawanan, yang tidak membatasi jumlah Penyalur BBM yang dapat melayani kebutuhan perbekalan kapal perikanan. Berdasarkan data yang terhimpun, diketahui bahwa terdapat 8 Penyalur BBM di PPN Kejawanan selama tahun 2020. Jumlah ini dapat terus bertambah selama Penyalur BBM memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pihak PPN Kejawanan, salah satunya yaitu adanya faktur pajak dan fakta integritas. Pelayanan rekomendasi BBM bersubsidi mengacu kepada Perpres No.9 Tahun 2009, Perpres No.15 Tahun 2012, Perpres No. 191 Tahun 2014, Permen ESDM RI No.18 Tahun 2013 dan Permen ESDM RI No.6 Tahun 2014.



Gambar 5.1.7.c. Pengisian Perbekalan Bahan Bakar Minyak (BBM)

Jenis BBM yang didistribusikan yaitu solar. Apabila dibandingkan dengan data 2020, BBM non subsidi yang disalurkan pada tahun 2021 adalah sebanyak 10.275.388 KL atau mengalami peningkatan sebanyak 3,4% dari penyaluran BBM non subsidi pada tahun 2020 yang berjumlah 9.933.575 KL. Peningkatan ini terjadi karena jumlah kapal yang berangkat dari PPN Kejawanan pada tahun 2021 juga meningkat. Pada data penyaluran BBM tahun 2021, menunjukkan bahwa tingkat konsumsi perbekalan kapal

perikanan terhadap BBM seluruhnya adalah BBM non subsidi. Hal ini terjadi karena jumlah BBM subsidi dihentikan alokasinya dari Pertamina dengan salah satu pertimbangannya adalah 56,4% kapal di PPN Kejawan adalah kapal dengan ukuran lebih dari 30 GT.

5.1.8. Pengesahan Perjanjian Kerja Laut (PKL)

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 35/PERMEN-KP/2015 disebutkan bahwa Pengusaha Perikanan wajib menerapkan perjanjian kerja laut bagi Pekerja dan perjanjian kerja laut bagi Awak Kapal Perikanan dengan standar pengupahan yang layak. Lebih lanjut, dalam rangka penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) bagi Awak Kapal Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perjanjian Kerja Laut bagi Awak Kapal Perikanan, yang pada Pasal 6 disebutkan bahwa PKL bagi Awak Kapal Perikanan yang dilaksanakan pada Kapal Perikanan berbendera Indonesia harus diperiksa dan disahkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan di Indonesia.



Gambar 5.1.8. Skema Wewenang Syahbandar dalam Impelementasi HAM Perikanan

Pelayanan pengesahan PKL sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) PPN Kejawatanan, dimulai dari Nakhoda/Pemilik Kapal/Pengurus Kapal mengajukan permohonan pengesahan PKL disertai dengan persyaratan yang diperlukan. Setelah itu, Syahbandar Perikanan memeriksa permohonan pengesahan PKL tersebut serta keabsahan dan kelengkapan dokumen – dokumen persyaratan. Apabila dinyatakan lengkap dan sah, maka Syahbandar Perikanan melakukan pemanggilan terhadap Nakhoda dan Pemilik Kapal untuk menginformasikan isi PKL tersebut. Apabila kedua belah pihak setuju, maka Syahbandar Perikanan mengesahkan dan menandatangani format PKL yang bermaterai, kemudian mengarsipkannya.

Syahbandar Perikanan di PPN Kejawatanan melaksanakan pengesahan PKL Awak Kapal Perikanan terhadap kapal – kapal perikanan yang akan berlayar dalam operasi penangkapan ikan. Pengesahan PKL di PPN Kejawatanan telah dilaksanakan di PPN Kejawatanan sejak 02 Januari 2019. Data tahun 2021 tercatat telah dilaksanakan pengesahan PKL pada kapal – kapal perikanan yang akan berangkat ke daerah penangkapan ikan sebanyak 470 orang atau menurun 11,5% dari tahun 2020 yaitu 531 orang. Pada tahun 2021, telah disahkan sebanyak 210 orang awak kapal kapal dari kapal berukuran >5 – 30 GT dan 260 orang dari kapal berukuran ≥ 31 GT.

5.1.9. Pelaksanaan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)

Pelaksanaan SHTI dilandaskan kepada Catch Certificate yang dikeluarkan oleh Komisi Eropa No.1005/2008 tanggal 29 Oktober 2008. Regulasi tersebut merupakan Peraturan Komisi Eropa dalam rangka memerangi Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dari/ke Pasar Uni Eropa. Regulasi tersebut secara

tegas melarang masuknya produk perikanan yang berasal dari kegiatan IUU Fishing dengan mekanisme mewajibkan semua produk perikanan hasil tangkapan laut, kecuali hasil perikanan dari kegiatan budidaya, produk perikanan air tawar, ikan hias, kekerangan dan rumput laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan menindaklanjuti dengan disahkannya PERMEN KP No. 13/MEN/2012 sebagai pengganti PERMEN KP No. 28/MEN/2009 tentang Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) dan secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap untuk menerbitkan SHTI.



Gambar 5.1.9. Alur Pelayanan SHTI – Lembar Awal

Terdapat 32 total SHTI yang telah terbit pada tahun 2021, jumlah ini meningkat 18,5% dari jumlah penerbitan SHTI tahun 2020. Pada tahun 2021, terdapat 3 jenis SHTI, yaitu SHT I- LA, SHTI - LT dan SHTI – LTS. Cumi-cumi merupakan jenis komoditas dengan jumlah tertinggi yang tercatat pada SHTI - LA, yaitu 45.434 kg atau 62,8% dari jumlah total tahun 2021.



Sementara itu, SHTI – LTS didominasi oleh gurita 97,4% dan SHTI – LT seluruhnya adalah 100%. Seluruh komoditas yang tercatat dalam kondisi beku, komoditas komoditas ini diekspor ke negara Italia, Bulgaria, Yunani, Prancis dan Siprus.

5.1.10. Tambat Labuh Kapal Perikanan

Pelayanan jasa tambat labuh di PPN Kejawanan rata-rata berjumlah 54 (lima puluh empat) pelayanan kapal perikanan perbulan dan 12 (dua belas) pelayanan kapal non perikanan. Jumlah pelayanan tertinggi berada pada bulan Maret 2021 yaitu sebanyak 95 pelayanan. Besaran PNBP dari pelayanan tambat labuh dan kebersihan kolam tertinggi pada bulan Maret 2021 dengan pendapatan PNBP tambat labuh yaitu sebesar Rp. 377.528.580,- dan Rp. 15.529.509,- untuk pelayanan kebersihan kolam. Peningkatan penerimaan PNBP tambat labuh ini disebabkan karena kapal – kapal masih menunggu keberangkatan melaut dengan pengisian perbekalan dan musim ikan . Sehingga keberadaan kapal di kolam melebihi batas 30 etmal dimana tarif jasa yang dikenakan jauh lebih besar dengan tarif jasa di bawah 30 etmal.



Grafik 5.1.10. Tambat labuh dan kebersihan kolam

Penerimaan PNBP selama tahun 2021 atas pelayanan jasa tambat labuh senilai Rp. 2.032.750.386,- ,floating repair senilai Rp. 5.481.000 dan untuk kebersihan kolam senilai Rp. 108.237.226,-. Pelayanan jasa tambat labuh merupakan pelayanan yang memperoleh penerimaan PNBP paling tinggi

dibanding pelayanan jasa lainnya di PPN Kejawan, yaitu sebesar sekitar 45% dari total penerimaan PNPB tahun 2021 senilai Rp. 4.749.810.538,-.

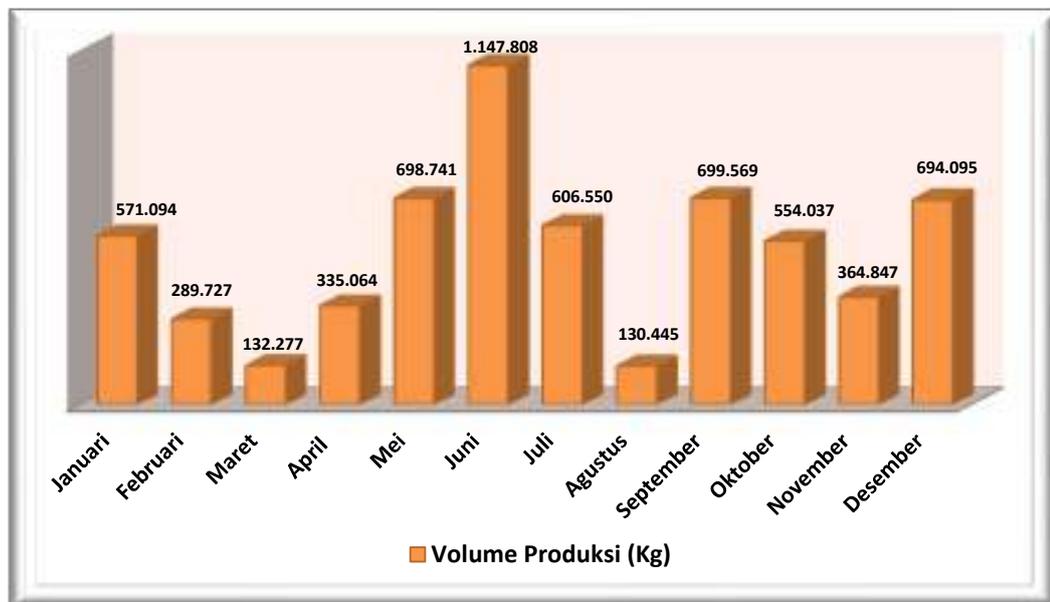
No	Bulan	Jumlah Permohonan		Biaya			Jumlah
		Kapal Perikanan	Kapal Non Perikanan	Tambat Labuh	Floating Repair	Kebersihan Kolam	
1	Januari	28	1	87.778.930	-	5.754.904	93.533.834
2	Februari	64	-	160.892.988	-	9.449.568	170.342.556
3	Maret	95	-	377.528.580	-	15.529.509	393.058.089
4	April	32	1	86.556.690	-	4.259.625	90.816.315
5	Mei	57	1	144.868.902	-	6.207.993	151.076.895
6	Juni	68	2	156.952.636	-	8.396.379	165.349.015
7	Juli	70	1	146.140.882	-	9.654.504	155.795.386
8	Agustus	64	2	332.381.174	-	13.620.889	346.002.063
9	September	48	-	176.062.346	5.481.000	7.945.072	189.488.418
10	Oktober	61	2	119.403.696	-	11.954.401	131.358.097
11	November	41	1	150.533.842	-	9.855.031	160.388.873
12	Desember	25	1	93.649.720	-	5.609.351	99.259.071
TOTAL		653	12	2.032.750.386	5.481.000	108.237.226	2.146.468.612

Tabel 5.1.10. Penerimaan Jasa Tambat labuh dan kebersihan kolam tahun 2021

5.2. Produksi Ikan

5.2.1. Volume Produksi Ikan

Volume produksi ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan pada tahun 2021 mencapai 6.224,25 ton dengan rincian produksi per jenis Alat Penangkap Ikan (API) yakni Jaring Insang Tetap/Gill Net sebesar 317,35 ton, Jaring Cumi/Bouke Ami sejumlah 2.550,12 ton, Pancing Cumi sejumlah 243,56 ton, Cast Net sejumlah 2.829,91 ton, Pukat Cincin (Purse Seine) Pelagis Besar sejumlah 98,63 ton, produksi Pukat Cincin (Purse Seine) Pelagis Kecil sebanyak 184,69 ton. Sedangkan total produksi yang berasal dari ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan ditambah dari produksi ikan yang didatangkan dari luar pelabuhan adalah yaitu 9.928,68 ton. Bila dibandingkan dengan produksi pada tahun 2020, mengalami kenaikan sebesar 2,71% dibandingkan dengan jumlah produksi pada tahun 2020 yaitu sejumlah 9.667,12 ton.



Grafik 5.2.1.a Produksi Ikan Per Bulan pada Tahun 2021 di PPN Kejawan



Grafik5.2.1.b Produksi Ikan Per Jenis Alat Penangkap Ikan pada Tahun 2021 di PPN Kejawan



Grafik 5.2.1.c Produksi Ikan Per Bulan dan Per Alat Penangkap Ikan pada Tahun 2021 di PPN Kejawan

Secara keseluruhan, volume produksi ikan tertinggi pada tahun 2021 terjadi pada Bulan Juni yaitu 1.147,81 ton (18,44% dari volume produksi total tahun 2021), Bulan September sejumlah 699,52 ton (11,24% dari volume produksi total tahun 2021) dan Bulan Mei sebanyak 698,74 ton (11,23% dari volume produksi total tahun 2021).

Volume produksi ikan tertinggi yang dihasilkan oleh kapal dengan alat penangkap ikan *Bouke Ami* terjadi pada Bulan September yaitu 398,49 ton. Jumlah tersebut 15,63% dari volume produksi total kapal dengan alat penangkap ikan *Bouke Ami*. Sejumlah 772,82 ton ikan dihasilkan oleh kapal dengan alat penangkap ikan *Cast Net* pada Bulan Juni dan merupakan 27,31% dari volume produksi total kapal dengan alat penangkap ikan *Cast Net* pada tahun 2021. Volume produksi ikan tertinggi yang dihasilkan oleh kapal dengan alat penangkap Pancing Cumi terjadi pada Bulan April yaitu 201,94 ton. Jumlah tersebut sama dengan 82,91% dari volume produksi total kapal dengan alat penangkap ikan Pancing Cumi pada tahun 2021. Volume produksi ikan tertinggi yang dihasilkan oleh kapal dengan alat penangkap Gill Net/Jaring Insang Tetap (Liong Bun) terjadi pada Bulan Februari yaitu 86,83 ton. Jumlah tersebut sama dengan 27,36% dari volume produksi total kapal dengan alat penangkap ikan Gill Net/Jaring Insang Tetap (Liong Bun) pada tahun 2021. Volume produksi ikan tertinggi yang dihasilkan oleh kapal dengan alat penangkap Purse Seine Pelagis Besar terjadi pada Bulan November yaitu 28 ton. Jumlah tersebut sama dengan 28,39% dari volume produksi total kapal dengan alat penangkap ikan Purse Seine Pelagis Besar pada tahun 2021. Secara umum, volume produksi ikan terendah pada tahun 2021 terjadi pada Bulan Agustus yaitu 130,45 ton (2,10% dari volume produksi total tahun 2021).

5.2.2. Nilai Produksi

Produksi ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan pada tahun 2021 mencapai 6.224,25 ton dengan nilai sejumlah Rp. 385.314.118.664,-. Produksi tahun 2021 bila dibandingkan dengan produksi

tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 40,76 % yaitu dengan produksi 1.802,51 ton , serta nilai produksi mengalami kenaikan juga dibanding tahun 2020 sebesar Rp. 118.320.645.064,- .

Tabel.5.2.2 Volume dan Nilai Produksi Ikan Per Bulan Tahun 2021

Bulan	Volume (kg)	Nilai (Rp)
Januari	571.094	38.094.239.800,-
Februari	289.727	16.662.332.450,-
Maret	132.277	8.470.838.250,-
April	335.064	18.917.802.800,-
Mei	698.741	34.606.529.600,-
Juni	1.147.808	59.316.189.450,-
Juli	606.550	44.760.842.300,-
Agustus	130.445	11.392.589.114,-
September	699.569	45.556.300.000,-
Oktober	554.037	37.780.753.900,-
November	364.847	22.576.990.100,-
Desember	694.095	47.178.710.900,-
Jumlah	6.224.254	385.314.118.664,-

Nilai produksi ikan yang didaratkan ditambah dengan nilai produksi ikan dari luar pelabuhan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan pada tahun 2021 yaitu Rp. 809.832.433.434,-. Apabila dibandingkan dengan nilai produksi ikan pada tahun 2020 yang mencapai Rp. 659.813.591.910,-, maka pada tahun 2021 nilai produksinya mengalami kenaikan sebesar 22,74%. Nilai produksi mengalami perubahan setiap bulannya bahkan perharinya. Hal ini disebabkan oleh harga ikan yang berfluktuasi di lapangan, bergantung kepada jenis ikan, ketersediaan stok ikan, mutu ikan dan musim. Petugas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) melakukan suvey harga perjenis ikan setiap bulannya secara rutin.

5.2.3. Harga Rata – rata Ikan

Harga rata-rata ikan per kilogram yaitu Rp.61.905,-. harga rata-rata ikan tahun 2021 ini mengalami kenaikan sebesar 2,52% dari harga rata-rata per kilogram ikan pada tahun 2020 yaitu sejumlah Rp.60.382,-. Harga rata-rata ikan tersebut didapatkan dari nilai produksi ikan (dalam satuan Rupiah) dalam periode waktu satu tahun dibagi dengan volume produksi (dalam satuan Kilogram) dalam periode waktu satu tahun.

Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dalam kondisi beku. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan antara lain:

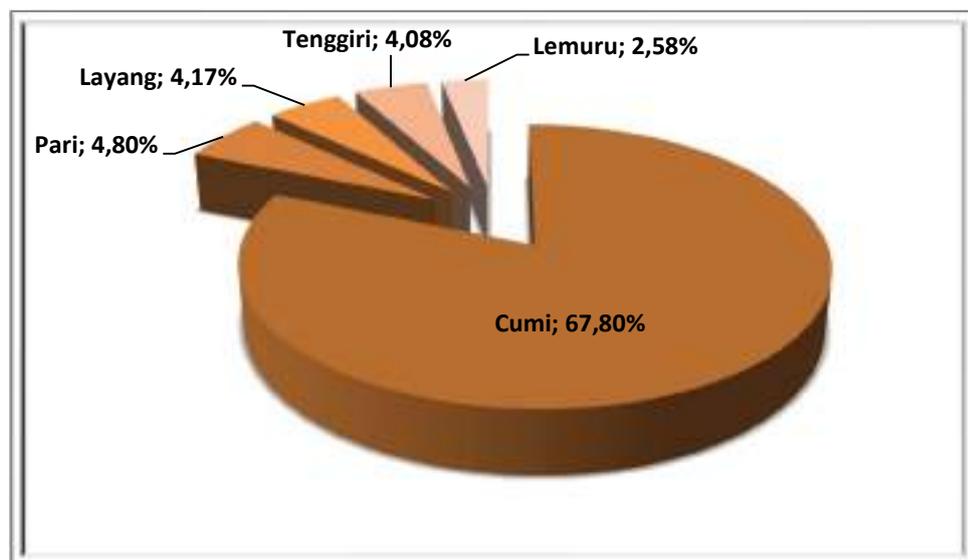
- 1) Jenis ikan yang bernilai ekonomis tinggi maka nilai produksi akan naik;
- 2) Penggunaan teknologi freezer di kapal sehingga ikan didaratkan dalam keadaan beku berperan besar dalam menjaga mutu hasil tangkapan. Mutu hasil tangkapan yang terjaga berbanding lurus dengan harga jual yang juga semakin tinggi; dan
- 3) Harga ikan di pelabuhan sangat tergantung dari supplier, apabila supplier berani mengambil ikan yang ditawarkan. Supplier terbesar yang mengambil ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yaitu Jakarta dan Bandung.

5.3. Produksi Ikan Dominan

5.3.1. Produksi Dominan Umum

Berdasarkan volumenya, jenis ikan yang paling banyak didaratkan yaitu Cumi (4.219,87 ton) sejumlah 67,80% dari jumlah seluruh produksi ikan. Ikan dominan kedua yaitu Layang sebanyak 4,80% dari jumlah seluruh produksi ikan

dengan volumenya mencapai 298,65 ton. Produksi terendah yaitu Ikan Pari Sekop/Onde dengan volume 0,23 ton atau sama dengan 0,004% dari jumlah seluruh produksi pada tahun 2021. Volume produksi total yang ditangkap oleh kapal dengan alat penangkap, Bouke Ami, Jaring Insang Tetap (Gill Net), Jaring Insang Hanyut (Drift Net), Purse Seine Pelagis Kecil, Purse Seine Pelagis Besar, Pancing Cumi, Cast Net, pada tahun 2021 mencapai 6.224,25 ton.



Grafik 5.3.1. Beberapa jenis ikan dengan jumlah produksi dominan pada tahun 2021 di PPN Kejawan

5.3.2. Produksi Ikan Dominan Alat Penangkap Bouke Ami

Cumi merupakan jenis ikan dengan volume produksi tertinggi yang ditangkap dengan menggunakan Bouke Ami, yaitu mencapai 1.916,37 ton. Produksi Cumi tersebut merupakan 30,75% dari jumlah produksi seluruh jenis ikan pada tahun 2021, 75,15% dari jumlah total produksi yang dihasilkan oleh kapal perikanan dengan alat penangkap Bouke Ami dan 45,41% dari jumlah seluruh produksi cumi pada tahun 2021 baik yang ditangkap dengan Bouke Ami, Cast Net, Pancing Cumi, Gill Net (Liong Bun), dan Purse Seine Pelagis Kecil. Volume produksi terendah yang dihasilkan oleh kapal perikanan dengan alat penangkap

ikan Bouke Ami yaitu Ikan Lencam, sejumlah 0,076 ton dan 0,003% dari jumlah seluruh produksi oleh kapal dengan alat penangkap Bouke Ami serta sejumlah 0,001% dari jumlah seluruh produksi di tahun tahun 2021.



Grafik 5.3.2. Produksi Ikan Dominan yang Ditangkap dengan Alat Penangkap Bouke Ami pada Tahun 2021 di PPN Kejawan

Penggunaan alat bantu panangkapan berupa lampu pada alat penangkap Bouke Ami menarik Cumi-cumi yang bersifat fototaksis positif untuk mendekati cahaya lampu tersebut. Selain itu, plankton yang bersifat fototaksis positif berada di sekitar cahaya, ikan-ikan kecil pemangsa plankton tertarik mendekati area tersebut sehingga Cumi-cumi mendekat untuk mendapatkan mangsanya. Demikian yang terjadi sehingga terjadi rantai makanan. Hal ini mengindikasikan dengan tepat, mengapa volume Cumi-cumi dominan pada hasil tangkapan Bouke Ami.

5.3.3. Produksi ikan dominan alat penangkap Pukat Cincin (Purse Seine) Pelagis Kecil

Volume produksi Ikan Layang sejumlah 95,11 ton merupakan jenis ikan produksi dominan dari kapal penangkap dengan alat penangkap Purse Seine Pelagis Kecil. Jumlah ini merupakan 51,50% dari volume seluruh produksi kapal dengan alat penangkap Purse Seine Pelagis Kecil dan 31,85% dari volume seluruh jenis Ikan Layang yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan pada tahun 2021.



Grafik 5.3.3. Produksi Ikan Dominan yang Ditangkap dengan Alat Penangkap Pukat Cincin Pelagis Kecil Tahun 2020 di PPN Kejawan

Ikan layang sebagai hasil tangkapan dominan dari kapal dengan alat penangkap ikan Purse Seine Pelagis Kecil dapat diuraikan bahwa ikan tujuan penangkapan Purse Seine adalah ikan-ikan *Pelagic Shoaling Species*, yang berarti ikan-ikan tersebut haruslah membentuk suatu gerombolan, berada dekat dengan permukaan air dan sangat diharapkan agar densitas gerombolan itu tinggi, yang berarti jarak antara ikan dengan ikan lainnya haruslah sedekat mungkin. Alat penangkap jenis ini sangat efektif untuk menangkap jenis Ikan Layang dan Lemuru.

5.3.4. Produksi ikan dominan alat penangkap Purse Seine Pelagis Besar

Volume produksi Ikan Cakalang sejumlah 52,22 ton merupakan jenis ikan produksi dominan dari kapal penangkap dengan alat penangkap Purse Seine Pelagis Besar. Jumlah ini merupakan 52,95% dari volume seluruh produksi kapal dengan alat penangkap Purse Seine Pelagis Besar dan 52,95% dari volume seluruh jenis Ikan Cakalang yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan pada tahun 2021.



Grafik 5.3.4 Produksi Ikan Dominan yang Ditangkap dengan Alat Penangkap Purse Seine Pelagis Besar Tahun 2021 di PPN Kejawanan

Ikan Cakalang sebagai hasil tangkapan dominan dari kapal dengan alat penangkap ikan Purse Seine Pelagis Besar dapat diuraikan bahwa ikan tujuan penangkapan Purse Seine adalah ikan-ikan *pelagic shoaling species*, yang berarti ikan-ikan tersebut haruslah membentuk suatu gerombolan, berada dekat dengan permukaan air dan sangat diharapkan agar densitas gerombolan itu tinggi, yang berarti jarak antara ikan dengan ikan lainnya haruslah sedekat mungkin. Alat penangkap jenis ini sangat efektif untuk menangkap jenis ikan Tongkol, Tuna dan Layang.

5.3.5. Produksi ikan dominan alat penangkap Gill Net/Jaring Insang

Kapal dengan alat penangkap Gill Net/Jaring Insang hanya mendaratkan 3 jenis ikan yaitu Pari, Cucut dan ikan lain-lain. Volume produksi Ikan Pari sebesar 277,68 ton dengan persentase 87,50% dari seluruh volume produksi kapal *Gill Net/Jaring Insang Tetap*, Ikan Cucut sebesar 2,77% dengan volume produksi sebesar 8,79 ton dan ikan lain-lain volume produksi sebesar 24,813 ton dengan persentase 7,82%. Tahun 2021 kapal *Gill Net/Jaring Insang Tetap* mendaratkan hasil tangkapan Bulan Januari, Februari, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, November dan Desember. Seluruh ikan yang didaratkan sudah dalam keadaan beku.



Grafik 5.3.5. Produksi Ikan Dominan yang Ditangkap dengan Alat Penangkap Gill Net/Jaring Insang Tahun 2021 di PPN Kejawanan

Selain dalam keadaan beku, Ikan Pari yang didaratkan dalam keadaan sudah dibuang isi perutnya dengan tujuan untuk mencegah perkembangan bakteri yang banyak terdapat pada isi perut ikan, dalam rangka menjaga mutu ikan.

5.3.6. Produksi ikan dominan alat penangkap Pancing Cumi

Volume produksi Cumi sejumlah 122,88 ton merupakan jenis ikan produksi dominan dari kapal penangkap dengan alat penangkap Pancing Cumi. Jumlah ini merupakan 50,45% dari volume seluruh produksi kapal dengan alat penangkap Pancing Cumi dan 2,91% dari volume seluruh jenis Cumi-cumi yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan pada tahun 2021.



Grafik 5.3.6 Produksi Ikan Dominan yang Ditangkap dengan Alat Penangkap Pancing Cumi Tahun 2021 di PPN Kejawanan

5.3.7. Produksi ikan dominan alat penangkap Cast Net

Volume produksi Cumi-cumi sejumlah 2.172.615 ton merupakan jenis ikan produksi dominan dari kapal penangkap dengan alat penangkap Cast Net. Jumlah ini merupakan 76,77% dari volume seluruh produksi kapal dengan alat penangkap Cast Net dan 51,49% dari volume seluruh jenis Cumi-cumi yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan pada tahun 2021.



Grafik 5.3.7 Produksi Ikan Dominan yang Ditangkap dengan Alat Penangkap Cast Net Tahun 2021 di PPN Kejawan

5.4. Operasional Pengembangan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)

Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) sebagai salah satu sarana yang dimiliki Pelabuhan Perikanan yang didalamnya terdapat kegiatan pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan dan kegiatan publikasi data tersebut dalam website PIPP. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2012 Tentang Kepelabuhan Perikanan Pasal 36, maka kelangsungan PIPP merupakan wujud pelaksanaan dari salah satu fungsi pelabuhan perikanan.

Kegiatan pelaksanaan sistem informasi pelabuhan perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan sudah berjalan melalui program aplikasi Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP). Setiap harinya, petugas melakukan entry data harian via website integrasi.djpt.kkp.go.id. Program aplikasi PIPP versi 2.0 yang dirilis tahun 2013 merupakan penyempurnaan versi sebelumnya.

Pelaksanaan entry data sudah dapat dilaksanakan setiap harinya dan dapat diakses oleh semua pihak melalui alamat website pipp.djpt.kkp.go.id.

Pelaksanaan/operasional PIPP di Pelabuhan Perikanan Nusantara sampai saat ini dilakukan secara harian, bulanan, dan situasional sesuai dengan format yang ada dalam sistem aplikasi PIPP itu sendiri. Pelaksanaan entry data aktivitas dan produksi telah kembali lagi ke aplikasi PIPP. Adapun data harian yang dalam pelaksanaan entry data dipindahkan ke aplikasi Data Sharing System yaitu :

1. Data produksi ikan perkapal (form H2)
2. Data Operasional kapal keluar pelabuhan (form H5)

Sedangkan dalam pelaksanaan entry data yang masih melalui program aplikasi Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan meliputi :

1. Data harian
 - a. Operasional kapal masuk pelabuhan (form H1)
 - b. Informasi atau berita kegiatan yang ada di PPN Kejawatanan
2. Data bulanan
 - a. Jasa dan pendapatan pelabuhan (form B1);
 - b. Operasional perbekalan dari dalam dan luar pelabuhan (form B2);
dan
 - c. Distribusi hasil perikanan yang didaratkan di pelabuhan.
 - d. Evaluasi Kinerja
 - e. Monitoring K5
3. Data tahunan/situasional
 - a. Industri di pelabuhan (form S1);
 - b. Registrasi kapal (form S2);
 - c. Data umum pelabuhan (form S6a – S6e);

- f. Fasilitas pokok (form S7a – S7i);
- g. Fasilitas fungsional (form S8a – S8t);
- h. Fasilitas penunjang (form S9a – S9d);
- i. Data lingkungan fisik pelabuhan/pangkalan perikanan (form S10);
- j. Kelembagaan UPT (form S11);
- k. Kelembagaan di dalam UPT (form S12);
- l. Masyarakat perikanan (form S13);
- m. Masalah dan Upaya ;
- n. Info Kegiatan.

Daerah penangkapan ikan (*fishing ground*) merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu armada penangkapan. Semakin baik kondisi daerah penangkapan, maka akan semakin banyak pula jumlah potensi hasil tangkapan yang akan kita peroleh. Apabila dilihat dari sisi jarak, lokasi daerah penangkapan ikan merupakan hal yang menjadi pertimbangan untuk melakukan penangkapan berkaitan dengan biaya operasional melaut.

Kapal-kapal perikanan yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan didominasi oleh kapal dengan alat tangkap Bouke Ami. Kapal dengan ukuran < 30 GT yang diijinkan alokasi daerah penangkapannya dapat menjelajahi WPP-NRI 712 (Laut Jawa) dan > 30 GT dengan WPP-NRI 711 (Perairan Natuna, Laut Cina Selatan, Selat Karimata), WPP-NRI 713 (Perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali) dan WPP-NRI 718 (Perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur)

5.5. Pengendalian Mutu Hasil Perikanan Melalui Inspeksi Pembongkaran Ikan dan Uji Formalin.

Kegiatan pengendalian mutu hasil perikanan agar tetap bermutu tertinggi merupakan upaya untuk mencegah hasil dan produk perikanan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta menjamin bahwa hasil dan produk perikanan tidak akan membahayakan konsumen. Dalam upaya mewujudkan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan telah melakukan kegiatan operasional mutu & inspeksi pembongkaran ikan, baik secara organoleptik maupun kimiawi.

Kegiatan pengawasan dan pembinaan mutu yang meliputi inspeksi pengendalian mutu ikan serta pengujian mutu terhadap hasil tangkapan berupa uji organoleptik dan uji formalin di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dilaksanakan rutin setiap hari pada tiap kapal yang bongkar. Hasil uji formalin yang dilakukan oleh pengawas mutu dan pengelola produksi perikanan tangkap hasilnya negatif sehingga pada Tahun 2021 semua ikan yang didaratkan di TPI Kejawanan terbebas dari bahan berbahaya seperti formalin. Hal tersebut dapat dilaksanakan dikarenakan pengawas mutu dan pengelola produksi perikanan tangkap selalu melaksanakan sosialisasi cara penanganan ikan di atas kapal maupun saat pendaratan dan bongkar ikan serta bahaya penggunaan bahan tambahan berbahaya kepada stakeholder.

5.6 Sertifikasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik

Sertifikasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2019 tentang persyaratan dan tata penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik dan Perdirjen Nomor 7/PER-DJPT/2019 tentang persyaratan pengendalian mutu dan tata cara inspeksi pengendalian mutu pada kegiatan penangkapan ikan. Pengendalian mutu hasil tangkapan dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil penangkapan. Sertifikat CPIB diberikan pada kapal yang telah mendaratkan hasil tangkapan di PP Kejawatanan dan dinyatakan layak untuk diterbitkan S-CPIB. Dengan adanya Sertifikat CPIB maka bahan baku (*Raw Material*) dari hasil tangkapan terjamin akan keamanan mutunya sehingga aman dan layak untuk dikonsumsi. Pada Tahun 2021 PPN Kejawatanan telah menerbitkan S-CPIB sebanyak 25 lembar sertifikat. Berikut adalah nama-nama kapal yang telah memperoleh Sertifikat CPIB :

No	Nama Kapal	Alat Tangkap	Jenis Kapal	Pemilik	Nomor Sertifikat	Tanggal Terbit
1.	KM. Inka Mina 124	Cast Nets	Kapal Penangkap Ikan	Sawidi	1-CPIB/712.32.55/IV/2021	01 April 2021
2.	KM. Karsono Jaya II	Cast Nets	Kapal Penangkap Ikan	Sun Tiam Ho	2-CPIB/712.32.55/IV/2021	01 April 2021
3.	KM. Tri Buana III	Bouke Ami	Kapal Penangkap Ikan	Sugiarto Wijaya	3-CPIB/712.32.55/VI/2021	03 Juni 2021
4.	KM. Alam Bahari 2	Bouke Ami	Kapal Penangkap Ikan	PT. Sinar Alam Maritim	4-CPIB/712.32.55/VI/2021	03 Juni 2021
5.	KM. Apel Hijau 8	Cast Nets	Kapal Penangkap Ikan	Sarudin	5-CPIB/712.32.55/VI/2021	03 Juni 2021
6.	KM. Karunia	Bouke Ami	Kapal Penangkap Ikan	Budi Hermanto	6-CPIB/712.32.55/VI/2021	03 Juni 2021
7.	KM. Selat Karimata Indah I	Bouke Ami	Kapal Penangkap Ikan	Marwan	7-CPIB/712.32.55/VI/2021	03 Juni 2021
8.	KM. Obajaya Anugerah	Bouke Ami	Kapal Penangkap Ikan	Suhandi Wijaya	8-CPIB/712.32.55/VI/2021	03 Juni 2021
9.	KM. Khosasi	Bouke Ami	Kapal Penangkap Ikan	Usman	9-CPIB/712.32.55/VI/2021	03 Juni 2021
10.	KM. Hasil Mina VII	Bouke Ami	Kapal Penangkap Ikan	Agustinawati Kusni	10-CPIB/712.32.55/VI/2021	03 Juni 2021
11.	KM. Bintang Mas Rejeki	Cast Nets	Kapal Penangkap Ikan	Sanudi	11-CPIB/712.32.55/X/2021	04 Oktober 2021
12.	KM. Apel Hijau 1	Cast Nets	Kapal Penangkap Ikan	Abdul Sentosa	12-CPIB/712.32.55/X/2021	04 Oktober 2021
13.	KM. Desy Putri	Cast Nets	Kapal Penangkap Ikan	Abdul Rosid	13-CPIB/712.32.55/X/2021	04 Oktober 2021

14.	KM. Gelora Asmara 8	Cast Nets	Kapal Penangkap Ikan	Abdul Rosid	14-CPIB/712.32.55/X/2021	04 Oktober 2021
15.	KM. Haiteri Jaya	Cast Nets	Kapal Penangkap Ikan	Sun Tiam Ho	15-CPIB/712.32.55/X/2021	04 Oktober 2021
16.	KM. Hasil Terus II	Cast Nets	Kapal Penangkap Ikan	Joni	16-CPIB/712.32.55/X/2021	04 Oktober 2021
17.	KM. Hasil Mina 8	Bouke Ami	Kapal Penangkap Ikan	Masturi	17-CPIB/712.32.55/X/2021	04 Oktober 2021
18.	KM. Hasil Terus VI	Cast Nets	Kapal Penangkap Ikan	Teng Hock	18-CPIB/712.32.55/X/2021	04 Oktober 2021
19.	KM. Hasil Terus VIII	Cast Nets	Kapal Penangkap Ikan	Agustinawati Kusni	19-CPIB/712.32.55/X/2021	04 Oktober 2021
20.	KM. Hasil Terus XII	Cast Nets	Kapal Penangkap Ikan	Agustinawati Kusni	20-CPIB/712.32.55/X/2021	04 Oktober 2021
21.	KM. Obajaya Bahari	Bouke Ami	Kapal Penangkap Ikan	Sugairto Wijaya	21-CPIB/712.32.55/X/2021	04 Oktober 2021
22.	KM. Mekar Jaya V	Bouke Ami	Kapal Penangkap Ikan	Ramlan Pandapotan	22-CPIB/712.32.55/X/2021	04 Oktober 2021
23.	KM. Winong	Cast Nets	Kapal Penangkap Ikan	Debby Theodhora	23-CPIB/712.32.55/X/2021	04 Oktober 2021
24.	KM. Irmaja	Jaring Cumi	Kapal Penangkap Ikan	Sudirman	24-CPIB/712.32.55/X/2021	04 Oktober 2021
25.	Inka Mina 125	Bouke Ami	Kapal Penangkap Ikan	Carikah	25-CPIB/712.32.55/X/2021	04 Oktober 2021

Tabel 5.6. Sertifikasi S-CPIB yang diterbitkan PPN Kejawanan

5.7. Pelayanan Jasa

Pelayanan jasa dan fasilitas yang dilaksanakan di PPN Kejawan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tarif jasa yang dikenakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 75 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, selanjutnya berganti menjadi berdasarkan Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berlaku sejak 18 September 2021. PPN Kejawan melaksanakan sosialisasi kepada pengguna jasa atas diberlakukannya PP No 85 Tahun 2021 dan seluruh pelayanan jasa dan fasilitas di PPN Kejawan mengacu pada peraturan yang baru. Berikut adalah pelayanan yang dilaksanakan pada kelompok Tata Kelola dan Pelayanan Usaha.

5.7.1. Jasa Pas Masuk

Pelayanan ini dilakukan di pintu masuk ke pelabuhan, setiap pengunjung yang memasuki kawasan PPN Kejawan dikenakan pungutan pas masuk harian. Berikut adalah data kunjungan di PPN Kejawan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021.

<i>Tarif Berdasarkan PP 85 Tahun 2021</i>							
Bulan	Sepeda Motor Roda 2/3	Roda 4	Roda 6	Roda 10	Roda >10	Bus	Bus Karyawan
18-29 September	2.318	982	205	29	14	-	-
Oktober	3.476	1.697	330	58	44	3	-
November	3.018	1.587	404	26	31	3	-
Desember	2.502	1.595	325	32	21	-	-
Jumlah	11.314	5.861	1.264	145	110	6	-

Tarif Berdasarkan PP 75 Tahun 2015				
Bulan	Sepeda Motor	Angkot/Mobil Penumpang	Bus /Truk	Truck Gandeng/ Trailer/ Countainer
Januari	3.924	1.206	694	8
Februari	3.953	1.222	677	10
Maret	6.160	1.870	893	8
April	6.212	1.016	963	13
Mei	5.006	1.790	663	12
Juni	5.112	1.775	870	15
Juli	5.046	1.557	875	11
Agustus	5.785	1.977	1.541	25
1-17 September	3.745	1.587	831	8
Jumlah	44.943	14.000	8.007	110

Tabel 5.7.1.a. Jumlah Kunjungan di PPN Kejawan Bulan Januari - September 2021

Namun setelah berlaku PP 85 Tahun 2021 berlaku juga pungutan pas masuk berlangganan yang dibayarkan setiap bulannya. Pas masuk berlangganan sebagian besar dimanfaatkan oleh para investor dan pengguna jasa lainnya yang melakukan kegiatan rutin di PPN Kejawan sehingga akan lebih efisien. Data pas masuk berlangganan sejak bulan September sampai dengan Desember 2021 dapat dilihat di tabel di bawah ini.

Bulan	Kendaraan Gol I	Kendaraan Gol II	Kendaraan Gol III	Kendaraan Gol IV
	Roda 2/3	Roda 4	Roda 6	Roda 10
September	6	2	-	-
Oktober	365	72	8	-
November	367	71	8	3
Desember	364	70	8	3
Jumlah	1102	215	24	6

Tabel 5.7.1.b. Jumlah Kunjungan di PPN Kejawan Bulan September – Desember 2021

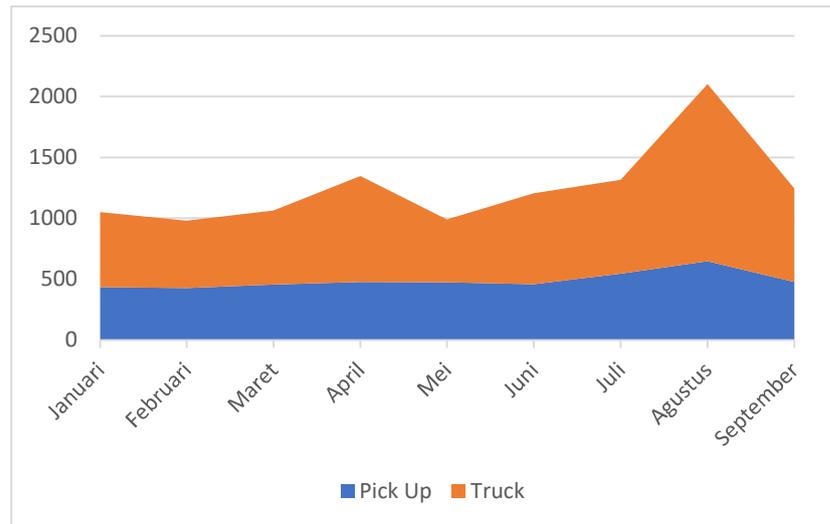
5.7.2. Pelayanan Jasa Kebersihan Bongkar Muat

Pelayanan ini ditujukan bagi kendaraan yang melakukan aktivitas bongkar muat di kawasan dermaga pelabuhan PPN Kejawan, namun setelah diberlakukannya PP No.85 Tahun 2021 tarif Pelayanan Jasa ini tidak lagi ada sehingga PPN Kejawan tidak lagi memungut pelayanan jasa bongkar muat. Pelayanan Jasa Kebersihan Bongkar Muat berdasarkan PP 75 Tahun 2021 di PPN Kejawan disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 5.7.2. Kendaraan Bongkar Muat Bulan Januari – September 2021

Bulan	Pick Up	Truck
Januari	434	617
Februari	427	553
Maret	454	609
April	477	869
Mei	474	517
Juni	459	746
Juli	545	770
Agustus	647	1.456
September	477	767
Jumlah	4.394	6.904
Rata-rata	488	767

Tingkat lalu lintas kendaraan bongkar muat sebagaimana pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata kunjungan pick up adalah 448 unit kendaraan perbulan, sedangkan untuk kendaraan truk mencapai 767 kendaraan masuk perbulannya. Berikut adalah grafik tingkat kunjungan khusus kendaraan bongkar muat.



Grafik 5.7.2. Aktifitas Kendaraan Bongkar Muat tahun 2021

5.7.3. Pelayanan Jasa Bengkel

Pelayanan ini dilaksanakan di gedung bengkel (*workshop*) milik PPN Kejawanan dengan luas 60 m². Namun karena kapal - kapal yang beraktifitas di kolam PPN Kejawanan adalah kapal > 30 GT dan sebagian besar pemilik kapal telah memiliki sarana perbaikan mesinnya sehingga whorkshop PPN Kejawanan belum dapat optimal. Selain itu minimnya peralatan yang dimiliki dan keterbatasan tenaga teknis juga sangat mempengaruhi minimnya perolehan PNBPN dari jasa bengkel. Pada Tahun 2021 terdapat aktifitas jasa bengkel yaitu pekerjaan pengelasan pagar dengan nominal jasa yang didapat sebesar Rp. 700.000,- pada bulan Desember.

5.7.4. Pelayanan Jasa Alat Berat

Jenis alat berat yang disewakan oleh pihak PPN Kejawanan antara lain adalah forklift, dum truck dan mobil crane. Selama tahun 2021, terdapat pelayanan jasa penggunaan kendaraan mobil crane dan forklip dan memperoleh PNBPN sebesar Rp.2.075.000,-. Untuk alat berat dumptruck dan forklip lebih difokuskan

untuk digunakan sendiri dalam operasional K5 di Pelabuhan, baik pengangkutan sampah kawasan pelabuhan maupun membawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kopi Luhur.

Bulan	Jumlah	Keterangan
Januari	-	-
Februari	-	-
Maret	-	-
April	150.000	Sewa 1 Jam (Crane)
Mei	600.000	Sewa 4 Jam (Crane)
Juni	600.000	Sewa 4 Jam (Crane)
Juli	-	-
Agustus	-	Sewa 2 Jam
September	-	-
Oktober	125.000	Sewa 1 Jam (Forklit)
November	-	-
Desember	600.000	Sewa 4 Jam (Crane)
TOTAL	2.075.000	

Tabel 5.7.4. Sewa alat berat tahun 2021

5.7.5. Pelayanan Jasa Listrik

Pelayanan jasa listrik umumnya diberikan kepada para investor di PPN Kejawanan dengan tarif yang berlaku. Sampai dengan saat ini, kebutuhan listrik dapat dipenuhi oleh jaringan listrik PLN yang tersedia. Secara umum, pemakaian listrik investor cukup stabil setiap bulannya yaitu berada di rata-rata 7.286,5 KWh. Tabel berikut adalah jumlah pemakaian KWH investor yang berasal dari jaringan listrik PPN Kejawanan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2021.

Tabel 5.7.5. Pemakaian Listrik Investor Pemakaian Listrik Investor (KWH)

Bulan	Jumlah Kwh
Januari	5.648
Februari	5.514
Maret	6.609
April	7.976
Mei	8.135
Juni	8.958
Juli	5.704
Agustus	8.327
September	9.410
Oktober	7.618
Nopember	6.670
Desember	6.869
Jumlah	87.438
Rata-rata	7.286,5

5.7.6. Pelayanan Jasa Air

PPN Kejawanon melayani jasa air bersih untuk investor yang berada di pelabuhan dan untuk perbekalan kapal perikanan yang akan berangkat melaut. Jumlah penyaluran air bersih untuk keperluan perbekalan kapal dan untuk keperluan darat (investor, waserda dan rumah dinas) disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 5.7.6. Penyaluran Air Bersih di PPN Kejawanan

Bulan	Perbekalan Kapal Perikanan (Lt)	Keperluan Darat (Lt)
Januari	301.000	1.536.562
Februari	762.000	1.339.123
Maret	935.000	1.533.849
April	291.000	1.417.334
Mei	497.000	1.647.955
Juni	885.000	2.325.255
Juli	812.000	1.681.818
Agustus	571.000	1.641.369
September	593.000	2.338.164
Oktober	685.000	1.864.787
November	227.000	1.680.045
Desember	184.000	1.885.926
Jumlah	6.743.000	20.892.187
Rata-Rata	561.917	1.741.016

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata kebutuhan air untuk pengisian air bersih kapal perbulan adalah 561 m³ air, sedangkan untuk keperluan darat/investor adalah sebesar 1.741 m³ air. Penyaluran air bersih untuk keperluan perbekalan kapal di bulan Juni dan Juli merupakan penyaluran air bersih dengan nilai tertinggi di tahun 2021, sedangkan penyaluran air bersih untuk aktifitas darat paling tinggi pada bulan September. Secara keseluruhan, kebutuhan air baik untuk perbekalan kapal maupun investor di lingkungan PPN Kejawanan dapat dipenuhi melalui suplai air dari PDAM Tirtagirinata Kota Cirebon yang terbagi menjadi dua (2) jalur yaitu jalur kapal menggunakan tarif D4 (Pelabuhan) dan jalur investor menggunakan tariff C5 (Niaga sedang) melalui jaringan milik PPN Kejawanan.

5.7.7. Pelayanan Jasa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Pelayanan jasa IPAL diperuntukan bagi perusahaan yang menghasilkan limbah cair dan terkoneksi pada instalasi IPAL milik PPN Kejawanan. Terdapat dua investor yang menggunakan fasilitas ini yaitu PT Sambu Perkasa Mandiri dan PT Pan Putera Samudra. Berikut adalah jumlah limbah cair dari kedua investor tersebut yang diolah di IPAL PPN Kejawanan.

Bulan	PT SAMBU PERKASA MANDIRI (m ³)	PT PAN PUTERA SAMUDERA (m ³)
Januari	153	462
Februari	138	358
Maret	290	980
April	172	597
Mei	206	1006
Juni	94	569
Juli	27	253
Agustus	256	947
September	223	706
Oktober	137	782
November	108	1.342
Desember	135	771
Total	1.939	8.773
Rata-rata	162	731

Tabel 5.7.7 Volume Limbah Cair Yang Dihasilkan

Bagi investor yang belum memiliki instalasi pengolahan air limbah maka wajib memiliki Instalasi Pengolahan Air limbah (IPAL) secara mandiri sehingga limbah yang dihasilkan dari aktifitas usahanya tetap diolah dan dibuang setelah memenuhi baku mutu sehingga kawasan PPN Kejawanan tetap ramah lingkungan dan berkelanjutan.

5.7.8. Rekomendasi Penggunaan Tanah Dan/Atau Bangunan

Pelayanan ini adalah untuk investor yang ingin berinvestasi dengan membangun dan mengoperasikan usaha di bidang perikanan dan pendukung kegiatan perikanan dengan menggunakan tanah milik PPN Kejawanen maupun bangunan milik PPN Kejawanen.

Sampai dengan bulan Desember 2021, terdapat 29 investor investor dan 8 unit kedai nelayan di PPN Kejawanen. Beberapa jenis usaha para investor yang ada yaitu processing ikan, cold storage, pengalengan rajungan, gudang alat penangkapan ikan, pabrik es, SPBB/bunker BBM, toko BAP, Dok dan galangan kapal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.7.8.a. Daftar Investor di PPN Kejawanen (Kedai Nelayan)

NO	NAMA PENGUSAHA	Tahun kontrak	JENIS USAHA	Luas bangunan (m²)
1	KOPERASI MINA SEJAHTERA	2021	Perbekalan Logistik	24
2	KHOERİYAH	2020	Warung Makan dan Jajanan Khas Cirebon	24
3	SHOLEH	2020	Warung Oleh-Oleh Olahan Laut	24
4	KOMARIAH	2021	Warung Makan	24
5	SUKIRNO	2021	Warung makan	24
6	ANDAR SILABAN	2021	warung Sembako/Kelontong	24
7	MARJUKI	2021	warung Makan	24
8	IMAM KHUSAERI	2021	Warung Kopi	24

Tabel 5.7.8.b. Daftar Investor di PPN Kejawanan

NO	NAMA INVESTOR	Tahun Kontrak	JENIS USAHA	Luas Tanah (m ²)
1	PT. PAN PUTRA SAMUDRA	2020	Pengalengan Rajungan	3.400
2	PT. EVADARTA CIREMAI	2018	SPBB KHUSUS	1.052
3	PT. CAHAYA BAHARI ABADI	2017	Processing Hasil perikanan dan Cold Storage	5.353
4	PT. TEGALINDO	2018	Galangan dan Dok Kapal	10.000
5	PT. ANDALAN SAMUDERA JAYA	2017	Gudang Sarana Produksi Penangkapan Ikan, Cold Storage dan Processing Hasil Perikanan	1.918
6	PT. ALAMSEGAR JAYA	2019	Cold storage, processing ikan dan kantor	3.117
7	PT. HASIL LAUT ANUGRAH	2017	Gudang Penampungan Ikan dan Cold Storage	2.276
8	PT. HASIL LAUT ANUGRAH II	2018	Bengkel Perikanan	1.000
9	PT. JAYA SEMANGAT WIRABAHARI	2018	Unit Pengolahan Ikan/Coldstorage, Pabrik Es dan Gudang Alat Penangkapan Ikan	2.940
10	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk	2018	Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	7,5
11	PD. SAMBU PERKASA MANDIRI	2018	Unit Pengolahan Ikan	4.072
12	PD. HORIZON SAMUDERA INDONESIA II	2020	Unit Pengolahan Ikan	1.892
13	CV. EKA JAYA SENTOSA	2018	Cold Storage	2.038
14	TENG HOCK	2020	Perbengkelan dan Toko Bahan Alat Perikanan (BAP)	1.400
15	RAMLAN PANDAPOTAN	2020	Gudang Sarana Produksi Penangkapan Ikan	1.138
16	HASANUDIN	2018	Warung Seafood	500
17	PT. JAYA SEMANGAT WIRABAHARI II	2019	Cold Storage mini dan Whorkshop	1.092
18	HENDRI KURNIADI	2017	Bengkel	1.000
19	PT. HORIZON SAMUDERA INDONESIA	2018	Pabrik Es dan Unit Pengolahan Ikan	3.500
20	PT. YFIN INTERNATIONAL	2019	Unit Pengolahan Ikan	1.000
21	PT. BINTANG SAMUDRA SUKSES	2018	Processing Hasil Perikanan, Cold Storage dan Gudang Logistik	4.589,5
22	ENI WAHYUNINGSIH	2018	Gudang Logistik Penangkapan Ikan dan Cold Storage	1.809
23	CHRISTINE	2018	Gudang Sarana Produksi Penangkapan Ikan	1.809
24	PT. FAHER HAYAD BERSATU	2019	Kantor penyaluran BBM (SOLAR)	50
25	PT. HACIENDA OCEAN INDUSTRIES	2019	Galangan dan Dok kapal	22.500
26	PT. PETRO UTAMA ENERGI	2020	Fixed Bunker Agent (Distribusi BBM)	750
27	PT. ANEKA SELERA NUSANTARA	2021	Kolam Edukasi dan Gazebo	1.198
28	PT. PERDANA INVESTAMA MINA	2021	Unit Pengolahan Ikan	4.606
29	PT. ANEKA SELERA NUSANTARA	2021	Rumah Makan (Resto and Coffee)	1.500
			Jumlah	87.607

5.7.9. Jasa Penggunaan Bangunan Pertemuan Nelayan

PPN Kejawanon memiliki gedung pertemuan dengan kapasitas 70 orang, fasilitas yang tersedia adalah jaringan internet wifi.id, sound sistem, toilet dan AC. Gedung tersebut merupakan fasilitas PPN Kejawanon yang digunakan sebagai tempat pertemuan nelayan atau tempat melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan. Berikut adalah data penggunaan gedung pertemuan nelayan pada tahun 2021.

Bulan	Nilai (Rp)	Lama Penggunaan
Januari	-	-
Februari	-	-
Maret	-	-
April	-	-
Mei	1.000.000	2 Hari
Juni	-	-
Juli	-	-
Agustus	-	-
September	-	-
Oktober	-	-
November	-	-
Desember	500.000	1 Hari
Jumlah	1.500.000	3 Hari

Tabel 5.7.9 Daftar Penggunaan Gedung Pertemuan Nelayan Tahun 2021

5.7.10. Jasa Tempat Perbaikan Jaring

Fasilitas tempat perbaikan jaring telah dimanfaatkan oleh pemilik kapal yang semula memperbaiki jaring dipinggir dermaga akhirnya beralih menggunakan fasilitas tempat perbaikan jaring dan dikenakan tarif sewa sesuai PP 75 tahun 2015 dan setelah tanggal 18 September 2021 dikenakan tarif sewa

sesuai dengan PP 85 Tahun 2021. Berikut adalah daftar pengguna tempat perbaikan jaring pada tahun 2021.

Bulan	Nilai (Rp)	Waktu Pemakaian	Keterangan
Januari	520.800	31 Hari	Tagihan Bulan Desember 2020
	520.800	31 Hari	
Februari	470.400	28 Hari	
Maret	520.800	31 Hari	
April	504.000	30 Hari	
Mei	520.800	31 Hari	
Juni	504.800	30 Hari	
Juli	520.000	31 Hari	
Agustus	520.800	31 Hari	
September	285.600	17 Hari	
	1.794.000	13 Hari	Berdasarkan Tarif PP 85 Tahun 2021
Oktober	4.140.000	30 Hari	
November	4.140.000	30 Hari	
Desember	4.140.000	30 Hari	
Total	19.102.800		

Tabel 5.7.10. Daftar Penggunaan Tempat Perbaikan Jaring Tahun 2021.

5.7.11. Jasa Cold Storage

PPN Kejawan memiliki cold storage kapasitas 200 ton yang terdiri atas 2 ruangan, masing – masing @100 Ton. Di PPN Kejawan tidak terdapat nelayan kecil yang mendaratkan hasil tangkapannya dan memerlukan cold storage untuk penyimpanan sementara sebelum dijual sedangkan kapal – kapal perikanan yang membongkar hasil tangkapan di TPI PPN Kejawan telah tersedia cold storage

milik swasta, sehingga pemanfaatan cold storage baru dimulai bulan Juli Tahun 2021.

Rekap penggunaan jasa coldstorage di PPN Kejawanan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut

No	Bulan	Stok Awal (kg)	Stok Masuk (kg)	Stok Keluar (kg)	Volume (Kg)	Jasa Cold Storage (Rp)	Total Jasa Cold Storage (RP)	
1	Juli	0	32.516	0	32.516	24.305.376	24.305.376	
2	Agustus	32.516	0	0	32.516	29.715.722	29.715.722	
3	September	32.516	0	3.990	28.526	26.363.256	26.363.256	
4	Oktober	28.526	3.711	14.272	17.965	20.724.760	32.040.760	
		0	30.000	0	30.000	11.316.000		
5	November	30.000	0	0	30.000	22.766.400	35.613.651	
		17.965	0	11.122	6.843	10.717.124		
		6.843	0	6.843	0	1.922.047		
		0	1.150	50	1.100	208.080		
6	Desember	1.100	0	130	970	252.389	22.524.293	
		970	0	170	800	239.904		
		30.000	0	0	30.000	22.032.000		
JUMLAH							170.563.058	

Tabel 5.7.11 Daftar Penggunaan Cold storage Tahun 2021

Dari table di atas dapat dilihat bahwa rata rata stok di Cold Storage di PPN Kejawanan setiap bulannya adalah 17.603 kg dari 3 pengguna dan penerimaan per tahun 2021 sebesar Rp.170.563.058,-

5.7.12. Jasa Mess

Jasa Penggunaan mess adalah pelayanan jasa kepada pada tamu apabila ingin menginap karena sedang mengikuti kegiatan di PPN Kejawanan. Di tahun 2021 jasa penggunaan mess digunakan sebanyak satu kali selama 4 (empat) hari dengan nilai pendapatan sebesar Rp.420.000,-.

5.7.13. Jasa Penggunaan Tanah Penjemuran Ikan

Pelayanan jasa penggunaan tanah untuk penjemuran ikan dimanfaatkan oleh investor untuk mengeringkan produk hasil olahan ikan sebelum dikemas dan dipasarkan. Selama tahun 2021 jasa penggunaan tanah penjemuran ikan digunakan pada Bulan November dan Desember oleh PT.Prima Samudera Premium dengan jumlah pendapatan sebesar Rp6.100.000,-

5.8. Hubungan Kelembagaan

5.8.1. Surat menyurat

Pelaksanaan kegiatan surat menyurat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 tahun 2021 tentang Kearsipan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan memanfaatkan arsip seoptimal mungkin, akan dapat tercapai tujuan organisasi, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan serta pengawasan. Mengingat pentingnya arsip dari suatu organisasi, maka arsip harus disimpan, dikelola dengan baik dan benar sesuai prinsip dan aturan yang berlaku, sehingga arsip dapat ditemukan kembali dengan cepat dan tepat serta efisien. Hal yang penting dalam mengelola arsip dalam sistem penataan arsip atau pemberkasan arsip (*filing system*) pada dasarnya merupakan suatu teknik atau pengaturan dan penyimpanan arsip secara logis dan sistematis dan sistem tata naskah sesuai peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Selain hal tersebut kearsipan yang ada di PPN Kejawanan sudah mempunyai aplikasi webbase terpusat yang dapat diakses melalui <https://elayar.kkp.go.id> sehingga admin persuratan dapat mendisposisikan surat yang masuk dan keluar secara

digital, user dalam hal ini pegawai PPN Kejawanan juga mendapatkan hak akses dalam mempergunakan aplikasi tersebut.

Jumlah surat masuk ke PPN Kejawanan pada tahun 2021 yaitu **1.120** dokumen, jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar **7,07 %** apabila dibandingkan dengan jumlah surat masuk pada tahun 2020 yang berjumlah **1.046** dokumen. Berdasarkan asal suratnya, terdiri atas berbagai instansi mulai dari sub direktorat dan direktorat Kementerian Kelautan Perikanan, pelabuhan perikanan lain di seluruh Indonesia, instansi yang terkait perikanan di wilayah Cirebon dan Jawa Barat seperti Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat, instansi non perikanan seperti Walikota Cirebon, stakeholder PPN Kejawanan, permintaan penelitian dari universitas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan lain sebagainya.

Sedangkan Sejumlah **1.146** surat yang keluar/diterbitkan oleh PPN Kejawanan selama tahun 2021. Jumlah ini mengalami penurunan **18,61 %** apabila dibandingkan dengan jumlah surat keluar pada tahun 2020 yang berjumlah **1.408** surat. Untuk melihat rekapitulasi surat masuk/keluar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan tahun 2021 pada lampiran **5.8.1**

5.9. Penyelenggaraan K5

Kegiatan K5 merupakan wujud dukungan operasional pelabuhan secara keseluruhan, hal ini dapat terlihat tanpa adanya jaminan dari kegiatan K5 tersebut tidak terwujud optimalisasi operasional pelabuhan yang telah berjalan. Salah satu kegiatan yang diharapkan dalam pengelolaan produksi perikanan adalah terjaminnya mutu hasil perikanan terutama ketika produk perikanan tersebut berada dipelabuhan. Terjaminnya mutu ikan ini tidak hanya dukungan cara

penanganannya saja, namun di dukung kualitas lingkungan yang aman, sehat, bersih, higienis dan rapi. Adapun kegiatan rutin dapat di uraikan sebagai berikut:

5.9.1. Keamanan dan Ketertiban

Dalam upaya menjaga kondisi pelabuhan agar tetap kondusif, disamping adanya pandemi covid-19 ini satuan petugas keamanan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan setiap saat melakukan penjagaan dan pemantauan di wilayah kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang meliputi area kantor, taman, jalan, wisata bahari, pos terpadu dan TPI dan wilayah sekitar dermaga yang juga dilengkapi dengan CCTV. Untuk mengoptimalkan kegiatan keamanan dan ketertiban ini penjagaan dilakukan pada saat jam kerja maupun diluar jam kerja (malam hari) yang dilaksanakan secara bergantian / shif. Selain itu juga, satuan petugas keamanan melakukan pelayanan terhadap tamu-tamu pelabuhan serta melayaninnya sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangannya.



Gambar 5.9.1.a koordinasi dengan instansi terkait terkait keamanan dan protocol kesehatan pada pengunjung yang bekerja disekitar komplek PPN Kejawanan



Gambar 5.9.1.b Patroli gabungan diakhir tahun 2021 bersama instansi terkait, memantau dan memastikan area wisata Pantai Kejawanen tertutup untuk umum dan tidak ada aktifitas masyarakat.



Gambar 5.9.1.c Petugas memungut Pas Masuk saat jam kerja di damping oleh petugas keamanan

5.9.2. Pelaksanaan Kebersihan dan Keindahan

Pelaksanaan kebersihan dan keindahan tidak jauh berbeda dengan kegiatan keamanan dan ketertiban yakni diarea kantor, taman, jalan, wisata bahari, pos terpadu dan TPI Kejawanen. Untuk kegiatan keberhasilan dan keindahan ini meliputi kegiatan pembersihan, pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan ditempat pembuangan akhir sampah, serta melakukan penyiraman, penanaman pepohonan dan penambahan tempat sampah dengan pemisahan sampah plastik dan non plastik, sehingga kondisi tersebut dapat mendukung kenyamanan, kesejukan dan keindahan lingkungan pelabuhan. Dan selain itu

dimasa pandemi ini petugas juga melakukan penyempotan disinfektan di kantor dan disekitarnya.



Gambar 5.9.2 Rutinitas petugas kebersihan melaksanakan kebersihan dan keindahan sekitar TPS juga sekitar kantor PPN kejawanan

5.9.3. Keselamatan Kerja

Dalam pelaksanaan kegiatan keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan di pelabuhan yang berjalan selama ini tidak hanya dirasakan pengguna jasa pelabuhan, akan tetapi kelengkapan keselamatan petugas pelabuhan juga dilengkapi dengan wearpack, sarung tangan dan alat pemadam kebakaran.

5.10. Wisata Pantai di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

Pantai sebagai salah satu sarana rekreasi dan penanaman nilai-nilai kebaharian yang bersifat edukatif perlu dikenalkan kepada masyarakat. Selain bertujuan sebagai pusat wisata pesisir di Kota Cirebon, wisata pantai juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana penambah wawasan sekaligus sosialisasi tentang beberapa hal berkaitan dengan dunia kelautan dan perikanan.

Pantai Kejawanan telah menjadi salah satu destinasi/tujuan wisata alam di kota Cirebon yang memiliki potensi kunjungan cukup tinggi baik oleh masyarakat dalam kota maupun luar kota.

Pada tahun 2021 dimasa pandemic covid-19 Pantai Kejawanan sementara di tutup untuk menjaga dan mengantisipasi timbulnya kluster pemaparan virus corona dan selama tahun 2021 dimanfaatkan PPN Kejawanan untuk menata kawasan menjadi lebih tertib melalui anggaran pusat maka tende biru yang selama ini menutupi bibir pantai dibersihkan dan disediakan kios kuliner sebagai tempat relokasi.

BAB VI

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHANNYA

PPN Kejawanan telah memiliki Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut (KKRL) yang ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.525/MEN-KP/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 dan Masterplan tahun 2021 dengan fokus pengembangan pelabuhan terbagi menjadi 2 (dua) fokus besar yaitu pengembangan perikanan tangkap termasuk industri perikanan dan pendukungnya pada area bagian barat dan pengembangan wisata bahari pada area bagian timur, baik wisata kerakyatan yang mengakomodir kearifan lokal maupun wisata skala besar yang akan dikerjasamakan dengan investor. PPN Kejawanan memiliki tanah bersertifikat seluas 27,92 Ha yang belum dilakukan penataan secara menyeluruh.

6.1. Permasalahan

Berdasarkan proses identifikasi yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa permasalahan yang sedang dihadapi oleh PPN Kejawanan.

- a. Akses jalan masuk dan jalan lingkungan kondisinya sempit dan banyak yang mengalami kerusakan sehingga tidak dapat diintasi kendaraan besar (container berpendingin) secara bersamaan;
- b. Belum tersedianya portal gate otomatis sehingga potensi PNBP pas masuk berpotensi tidak terpungut secara maksimal;
- c. Alur masuk maupun kolam pelabuhan sangat dangkal sehingga kapal > 60 GT kandas ketika akan masuk/keluar pelabuhan, pengisian perbekalan melaut seringkali tidak dapat dilakukan sepenuhnya di zona perbekalan karena kapal yang terisi tidak dapat keluar pelabuhan sehingga harus di bantu dengan

- pengisian pada kapal yang berukuran kecil, hal ini menyebabkan kapal-kapal enggan beraktifitas di PPN Kejawanan (Jumlah kapal berdomisili 257 unit kapal);
- d. Lahan area pengembangan bagian barat dan timur sebagian besar masih perairan;
 - e. Belum adanya penataan zona pemukiman nelayan seluas 1,2 Ha sehingga sebagian tanah dimanfaatkan masyarakat dan belum tersedianya pagar pembatas untuk area pemukiman nelayan;
 - f. Perlunya pengembalian batas atas HPL No 1 sehingga memudahkan dalam penataan kawasan;
 - g. Kondisi fender sudah rusak dan bolder tidak tersedia dalam jumlah yang cukup;
 - h. Belum ditetapkannya wisata bahari di PPN Kejawanan;
 - i. PNBP atas piutang yang kepengurusannya telah dilimpahkan ke KPKNL Cirebon telah dilakukan pembayaran dengan cara diangsur setiap bulannya oleh PT. HOI senilai Rp.18.181.818,- sehingga perlu upaya penyelesaian lebih lanjut agar segera lunas;
 - j. Perlunya persiapan baik prasarana maupun SDM dalam penerapan PNBP Pasca Produksi;
 - k. Belum dilaksanakan reuiu WKOPP PPN kejawanan.

6.2. Upaya Pemecahan Masalah

Berikut adalah solusi serta program pengembangan ke depan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh PPN Kejawanan.

- a. Masterplan PPN Kejawanan tahun 2021 telah ditetapkan, dengan didukung kepemilikan tanah yang telah bersertipikat PPN Kejawanan telah diusulkan sebagai salah satu pelabuhan perikanan yang akan dilakukan pengembangan pembangunan dengan mekanisme pembiayaan melalui PHLN dan pada tahun 2021 telah dilakukan survey oleh *Islamic Development Bank (IsDB)*.
- b. Jumlah kapal yang domisili tahun 2021 berjumlah 257 Unit Jumlah kapal akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh PPN Kejawanan. Namun peningkatan jumlah kapal tidak signifikan diiringi dengan peningkatan produksi ikan yang didaratkan, dikarenakan pada saat pulang membawa hasil tangkapan beberapa kapal tidak didaratkan di PPN Kejawanan melainkan di Pelabuhan pangkalan lainnya. Dengan akan diterapkannya Penangkapan Ikan Terukur dan PNPB Pasca Produksi dikhawatirkan jumlah produksi di PPN Kejawanan akan mengalami penurunan karena kebijakan pendaratan hasil tangkapan ikan disesuaikan dengan lokasi zona penangkapan;
- c. Saat ini zona pemukiman nelayan masih dihuni oleh 46 warga yang bukan bermata pencaharian nelayan selama lebih dari 10 tahun yang lalu, akan dilakukan pengembalian batas tanah sebagai upaya penertiban dan mengusulkan alokasi anggaran pembangunan di kawasan zona pemukiman nelayan;
- d. Bolder sudah diperbaiki tetapi jumlahnya blm sesuai dengan kebutuhan sehingga menyulitkan kapal untuk menambatkan tali di dermaga. sedangkan fender yang terbuat dari kayu sudah lapuk dan sudah tidak layak sehingga lambung kapal langsung membentur dinding dermaga pada saat kapal tambat;

- e. Pada tahun 2022 diupayakan mpungutan untuk tarif pas harian pelayanan wisata bahari sesuai tariff PP No 85 Tahun 2021 sebagai upaya optimalisasi peningkatan PNBP;
- f. Hutang PNBP an. PT. HOI senilai Rp.14.070.311.650,- sampai dengan 31 Desember 2021 PT. HOI sudah mengangsur senilai Rp. 2.763.636.362,- sehingga saldo piutang masih tersisa Rp.11.306.675.288,- ;
- g. Sudah dilakukan pelayanan kesyahbandaran di PP Karangsong dan PP Blanakan dengan menempatkan satu syahbandar dari PPN Kejawanen namun pelayanannya masih belum optimal terkendala kurangnya dukungan dari DKP provinsi baik SDM, sarana maupun prasarananya.

BAB VII

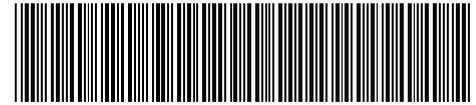
PENUTUP

Dengan disusunnya laporan tahunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2021 ini, diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada khususnya maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan pada umumnya dalam menetapkan kebijaksanaan dibidang perikanan. Semoga Laporan Tahunan ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : SP DIPA- 032.03.2.622482/2021**



DS:0676-7448-6498-5866

Revisi ke 05

Tanggal : 18 November 2021

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (032) | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 2. Unit Organisasi | : (03) | Ditjen Perikanan Tangkap |
| 3. Provinsi | : (02) | JAWA BARAT |
| 4. Kode>Nama Satker | : (622482) | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN |
| Sebesar | : Rp. | 12.084.369.000 (DUA BELAS MILIAR DELAPAN PULUH EMPAT JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- | | |
|-------|--|
| 04 | EKONOMI |
| 04.03 | PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN |

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	10.483.770.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	1.600.599.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|-----------------------|-----------|----------------|
| 1. KPPN C I R E B O N | (024) Rp. | 12.084.369.000 |
|-----------------------|-----------|----------------|

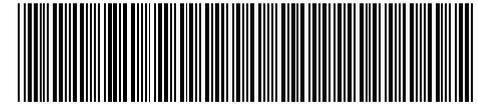
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 19 Juli 2021
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 032.03.2.622482/2021

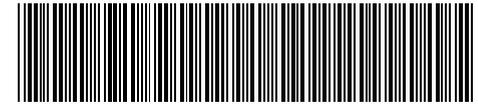


DS:0676-7448-6498-5866

Satker : (622482) PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN

HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Rp.	3.417.180.000
HB.2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	Rp.	16.500.000
HB.2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Rp.	3.330.911.000
HB.2339	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	Rp.	44.949.000
HB.2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Rp.	24.820.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	8.667.189.000
WA.2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	Rp.	8.667.189.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 032.03.2.622482/2021
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0676-7448-6498-5866

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perikanan Tangkap
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (622482) PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN

Halaman : I A. 1

Program	:	032.03.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			3.417.180.000
Kegiatan	:	2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan			16.500.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah kapal perikanan yang terbangun, terstandarisasi, terdaftar dan/atau yang memenuhi ketentuan			
		2. 01	Jumlah rekomendasi teknis, rancangan teknis Standar Nasional Indonesia, sertifikasi dan kerjasama pemanfaatan teknologi penangkapan ikan			
		3. 01	Tingkat kemandirian SKPT Saumlaki			
		4. 02	Jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan memenuhi ketentuan			
		5. 03	Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi			
		6. 04	Persentase mesin dan kapal perikanan yang dihitung produktivitasnya dan terpantau operasionalnya			
Klasifikasi Rincian Output	1	:	2337.BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	15,00	Orang	16.500.000
Rincian Output	:	01	BDC.001 Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya	15,00	Orang	16.500.000
Kegiatan	:	2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan			3.330.911.000
	:	1. 01	Jumlah Pengembangan Pelabuhan Perikanan			
	:	2. 01	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Kab. Merauke			
	:	3. 01	Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan			
Klasifikasi Rincian Output	2	:	2338.ADC Sertifikasi Produk	10,00	produk	10.000.000
Rincian Output	:	01	ADC.001 Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) yang diterbitkan	10,00	produk	10.000.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	2338.BAH Pelayanan Publik Lainnya	3,00	layanan	291.417.000
Rincian Output	:	01	BAH.001 Layanan kepelabuhanan perikanan yang dilaksanakan	1,00	layanan	280.507.000
	:	02	BAH.002 Layanan Penerbitan Surat Rekomendasi Pendaftaran Pembangunan SPDN yang dilaksanakan	1,00	layanan	860.000
	:	03	BAH.003 Layanan Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (S-CPIB)	1,00	layanan	10.050.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 032.03.2.622482/2021
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0676-7448-6498-5866

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perikanan Tangkap
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (622482) PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN

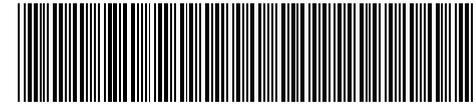
Halaman : I A. 2

Pelayanan Publik Lainnya
yang dilaksanakan

layanan
1.00 layanan

Klasifikasi Rincian Output	4	:	2338.BGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	1,00	Lembaga	289.430.000
Rincian Output	:	01	BGA.002	Pelabuhan Perikanan yang dikelola dan operasional sesuai standar	1,00	Lembaga	289.430.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	2338.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	1,00	Unit	2.740.064.000
Rincian Output	:	01	RBQ.001	Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang ditingkatkan fasilitasnya (PN) (PEN)	1,00	Lokasi	2.740.064.000
Kegiatan	:	2339		Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan			44.949.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01		Persentase penataan perizinan usaha peanngkapan ikan			
		2. 01		Rata-rata pendapatan nelayan			
		3. 01		Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Natuna			
Klasifikasi Rincian Output	6	:	2339.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	60,00	Orang	4.000.000
Rincian Output	:	01	QDC.004	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya (PN)	60,00	Orang	4.000.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	2339.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	40.949.000
Rincian Output	:	01	UBA.001	Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi (PN)	1,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	40.949.000
Kegiatan	:	2341		Pengelolaan Sumber Daya Ikan			24.820.000
	:	1. 01		Persentase pelaksanaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial, perairan kepulauan dan ZEEI			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 032.03.2.622482/2021
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0676-7448-6498-5866

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perikanan Tangkap
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (622482) PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN

Halaman : I A. 3

Pengelolaan Sumber Daya Ikan

- 2. 01 Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan
- 3. 01 Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Nunukan
- 4. 02 Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di perairan darat

Klasifikasi Rincian Output	8	:	2341.QKB	Pemantauan produk	60,00	laporan	24.820.000
Rincian Output	01	:	QKB.001	Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi (PN)	60,00	laporan	24.820.000

Program	:	032.03.WA	Program Dukungan Manajemen			8.667.189.000
Kegiatan	:	2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap			8.667.189.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Nilai PM PRB bidang deregulasi kebijakan Ditjen Perikanan Tangkap			
		2. 01	Nilai PM PRB bidang manajemen perubahan Ditjen Perikanan Tangkap			
		3. 01	Nilai PM PRB bidang penguatan akuntabilitas Ditjen Perikanan Tangkap			
		4. 01	Nilai PMPRB bidang pengawasan Ditjen Perikanan Tangkap			
		5. 02	Nilai PM PRB bidang Sistem Manajemen SDM Ditjen Perikanan Tangkap			
		6. 02	Nilai PMPRB bidang penataan dan organisasi Ditjen Perikanan Tangkap			
		7. 03	Nilai PM PRB bidang penataan tatalaksana Ditjen Perikanan Tangkap			
		8. 03	Nilai kompetensi ASN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap			
		9. 04	Nilai PM PRB peningkatan kualitas pelayanan publik Ditjen Perikanan Tangkap			
		10. 04	Nilai kinerja ASN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap			
		11. 05	Nilai peningkatan disiplin ASN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap			
		12. 06	Nilai kualifikasi ASN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 032.03.2.622482/2021
I A. INFORMASI KINERJA**



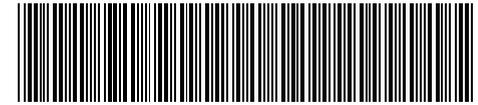
DS:0676-7448-6498-5866

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perikanan Tangkap
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (622482) PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN

Halaman : I A. 4

Klasifikasi Rincian Output	1	:	2342.EAA	Layanan Perkantoran	2,00	Layanan	8.305.689.000
Rincian Output		:	01 EAA.001	Gaji dan Tunjangan	1,00	layanan	5.255.689.000
		:	02 EAA.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,00	Layanan	3.050.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	2342.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1,00	Layanan	37.050.000
Rincian Output		:	01 EAB.001	Layanan Perencanaan Program dan Anggaran	1,00	layanan	37.050.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	2342.EAD	Layanan Sarana Internal	1,00	unit	99.500.000
Rincian Output		:	01 EAD.002	Layanan Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi	1,00	Unit	99.500.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	2342.EAF	Layanan SDM	30,00	orang	41.250.000
Rincian Output		:	01 EAF.003	Layanan Pengembangan, Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional	30,00	Layanan	41.250.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	2342.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	Layanan	46.000.000
Rincian Output		:	01 EAH.003	Layanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1,00	Layanan	46.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	2342.EAJ	Layanan Data dan Informasi	1,00	Layanan	9.900.000
Rincian Output		:	01 EAJ.001	Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan	1,00	Layanan	9.900.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 032.03.2.622482/2021
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0676-7448-6498-5866

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perikanan Tangkap
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (622482) PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN

Halaman : I A. 5

Klasifikasi Rincian Output	7	:	2342.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	2,00	Laporan	127.800.000	
Rincian Output		:	01	F AE.001	Laporan Program dan Kegiatan	1,00	Laporan	8.400.000
		:	02	F AE.002	Laporan Keuangan dan BMN	1,00	Laporan	119.400.000

Jakarta, 19 Juli 2021
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

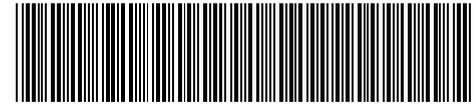
ttd.
Ir. Muhammad Zaini, M.M
NIP 196308141989031021

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : DIPA- 032.03.2.622482/2021

I B. SUMBER DANA



DS:0676-7448-6498-5866

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Unit Organisasi : (03) Ditjen Perikanan Tangkap
 Provinsi : (02) JAWA BARAT
 Kode>Nama Satker : (622482) PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN

Halaman : I B. 1

				Pagu			Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2021	Rp.	12.084.369.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
1. Rupiah Murni	Rp.	10.483.770.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0	
2. PNPB	Rp.	1.600.599.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0	
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0			
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0			
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 032.03.2.622482/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0676-7448-6498-5866

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perikanan Tangkap
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (622482) PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
622482	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	5.255.689	3.989.116	2.839.564	-	-	12.084.369		
032.03.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	-	677.116	2.740.064	-	-	3.417.180		
2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	-	16.500	-	-	-	16.500		
2337.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (02.54 JAWA BARAT / KOTA CIREBON)	-	16.500	-	-	-	16.500	02 . 54	
01	RM	-	16.500	-	-	-	16.500	024	
2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	-	590.847	2.740.064	-	-	3.330.911		
2338.ADC	Sertifikasi Produk (02.54 JAWA BARAT / KOTA CIREBON)	-	10.000	-	-	-	10.000	02 . 54	
01	RM	-	10.000	-	-	-	10.000	024	
2338.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (02.54 JAWA BARAT / KOTA CIREBON)	-	291.417	-	-	-	291.417	02 . 54	
01	RM	-	153.457	-	-	-	153.457	024	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 032.03.2.622482/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0676-7448-6498-5866

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perikanan Tangkap
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (622482) PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04 PNBP		-	137.960	-	-	-	137.960	024	
2338.BGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi (02.54 JAWA BARAT / KOTA CIREBON)	-	289.430	-	-	-	289.430	02 . 54	
01 RM		-	146.891	-	-	-	146.891	024	
04 PNBP		-	142.539	-	-	-	142.539	024	
2338.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan (02.54 JAWA BARAT / KOTA CIREBON)	-	-	2.740.064	-	-	2.740.064	02 . 54	
01 RM		-	-	1.494.964	-	-	1.494.964	024	
04 PNBP		-	-	1.245.100	-	-	1.245.100	024	
2339	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	-	44.949	-	-	-	44.949		
2339.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (02.54 JAWA BARAT / KOTA CIREBON)	-	4.000	-	-	-	4.000	02 . 54	
01 RM		-	4.000	-	-	-	4.000	024	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 032.03.2.622482/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0676-7448-6498-5866

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perikanan Tangkap
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (622482) PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2339.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (02.54 JAWA BARAT / KOTA CIREBON)	-	40.949	-	-	-	40.949	02 . 54	
01	RM	-	40.949	-	-	-	40.949	024	
2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	-	24.820	-	-	-	24.820		
2341.QKB	Pemantauan produk (02.54 JAWA BARAT / KOTA CIREBON)	-	24.820	-	-	-	24.820	02 . 54	
01	RM	-	24.820	-	-	-	24.820	024	
032.03.WA	Program Dukungan Manajemen	5.255.689	3.312.000	99.500	-	-	8.667.189		
2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	5.255.689	3.312.000	99.500	-	-	8.667.189		
2342.EAA	Layanan Perkantoran (02.54 JAWA BARAT / KOTA CIREBON)	5.255.689	3.050.000	-	-	-	8.305.689	02 . 54	
01	RM	5.255.689	3.050.000	-	-	-	8.305.689	024	
2342.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal (02.54 JAWA BARAT / KOTA CIREBON)	-	37.050	-	-	-	37.050	02 . 54	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 032.03.2.622482/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN**



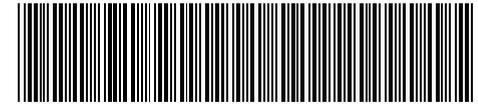
DS:0676-7448-6498-5866

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perikanan Tangkap
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (622482) PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	37.050	-	-	-	37.050	024	
2342.EAD	Layanan Sarana Internal (02.54 JAWA BARAT / KOTA CIREBON)	-	-	99.500	-	-	99.500	02 . 54	
01 RM		-	-	24.500	-	-	24.500	024	
04 PNBP		-	-	75.000	-	-	75.000	024	
2342.EAF	Layanan SDM (02.54 JAWA BARAT / KOTA CIREBON)	-	41.250	-	-	-	41.250	02 . 54	
01 RM		-	41.250	-	-	-	41.250	024	
2342.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (02.54 JAWA BARAT / KOTA CIREBON)	-	46.000	-	-	-	46.000	02 . 54	
01 RM		-	46.000	-	-	-	46.000	024	
2342.EAJ	Layanan Data dan Informasi (02.54 JAWA BARAT / KOTA CIREBON)	-	9.900	-	-	-	9.900	02 . 54	
01 RM		-	9.900	-	-	-	9.900	024	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 032.03.2.622482/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0676-7448-6498-5866

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perikanan Tangkap
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (622482) PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
2342.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (02.54 JAWA BARAT / KOTA CIREBON)	-	127.800	-	-	-	127.800	02 . 54	
01 RM		-	127.800	-	-	-	127.800	024	
JUMLAH		5.255.689	3.989.116	2.839.564	-	-	12.084.369		

Jakarta, 19 Juli 2021
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

ttd.
Ir. Muhammad Zaini, M.M
NIP 196308141989031021

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 032.03.2.622482/2021
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:0676-7448-6498-5866

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perikanan Tangkap
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (622482) PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	622482	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	681.718	683.022	685.584	749.488	957.315	1.239.537	1.104.425	1.642.591	1.517.152	909.694	1.006.916	906.927	12.084.369
		BELANJA PEGAWAI	399.420	399.420	399.420	399.420	496.336	399.420	446.806	410.864	467.364	474.764	464.475	497.981	5.255.689
		BELANJA BARANG	282.298	283.602	286.165	285.209	286.328	310.257	302.918	316.393	447.140	370.070	477.582	341.155	3.989.116
		BELANJA MODAL	0	0	0	64.860	174.651	529.860	354.700	915.334	602.648	64.860	64.860	67.792	2.839.564
032.03.HB.2337		Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	1.328	1.328	1.328	1.328	1.328	1.328	1.328	1.352	1.642	1.387	1.387	1.436	16.500
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	1.328	1.328	1.328	1.328	1.328	1.328	1.328	1.352	1.642	1.387	1.387	1.436	16.500
032.03.HB.2338		Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	34.495	34.311	34.252	99.111	133.931	552.866	392.455	957.139	737.480	125.749	117.844	111.279	3.330.911
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	34.495	34.311	34.252	34.252	34.280	44.005	37.755	41.804	134.833	60.889	52.984	46.987	590.847
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	64.860	99.651	508.860	354.700	915.334	602.648	64.860	64.860	64.292	2.740.064
032.03.HB.2339		Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	991	991	991	991	991	991	991	2.991	6.131	24.490	2.181	2.217	44.949
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	991	991	991	991	991	991	991	2.991	6.131	24.490	2.181	2.217	44.949
032.03.HB.2341		Pengelolaan Sumber Daya Ikan	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	2.877	2.299	2.299	2.069	2.000	24.820
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	2.877	2.299	2.299	2.069	2.000	24.820
032.03.WA.2342		Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	643.007	644.495	647.117	646.161	819.169	682.455	707.753	678.233	769.599	755.769	883.435	789.995	8.667.189
		51 BELANJA PEGAWAI	399.420	399.420	399.420	399.420	496.336	399.420	446.806	410.864	467.364	474.764	464.475	497.981	5.255.689

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 032.03.2.622482/2021
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:0676-7448-6498-5866

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perikanan Tangkap
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (622482) PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN

Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	243.588	245.076	247.697	246.741	247.832	262.036	260.947	267.368	302.235	281.005	418.961	288.514	3.312.000
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	75.000	21.000	0	0	0	0	0	3.500	99.500
		PERKIRAAN PENERIMAAN	402.365	402.365	402.365	402.365	402.365	402.365	402.365	402.365	402.365	402.365	402.365	402.382	4.828.397
		- PNB (425151)	30.873	30.873	30.873	30.873	30.873	30.873	30.873	30.873	30.873	30.873	30.873	30.881	370.484
		- PNB (425621)	358.967	358.967	358.967	358.967	358.967	358.967	358.967	358.967	358.967	358.967	358.967	358.976	4.307.613
		- PNB (425699)	12.525	12.525	12.525	12.525	12.525	12.525	12.525	12.525	12.525	12.525	12.525	12.525	150.300

Jakarta, 19 Juli 2021
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

ttd.
Ir. Muhammad Zaini, M.M
NIP 196308141989031021

**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 032.03.2.622482/2021
IV A. B L O K I R**



DS:0676-7448-6498-5866

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [03] Ditjen Perikanan Tangkap
Provinsi : [02] JAWA BARAT
Kode dan Nama Satker : [622482] PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN

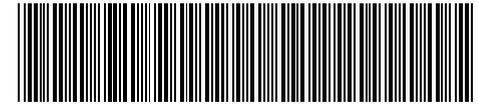
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 19 Juli 2021
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

ttd.
Ir. Muhammad Zaini, M.M
NIP 196308141989031021

**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 032.03.2.622482/2021
IV B. C A T A T A N**



DS:0676-7448-6498-5866

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [03] Ditjen Perikanan Tangkap
Provinsi : [02] JAWA BARAT
Kode dan Nama Satker : [622482] PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 19 Juli 2021
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

ttd.
Ir. Muhammad Zaini, M.M
NIP 196308141989031021

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan : NSAIE1T
Tanggal : 06/06/22
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : 03 DITJEN PERIKANAN TANGKAP
WILAYAH/PROPINSI : 0200 JAWA BARAT
SATUAN KERJA : 622482 PPN KEJAWANAN

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Penerimaan	640,000	0	640,000	0.00
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	498,811,145	485,961,497	12,849,648	2.64
Piutang Bukan Pajak	11,313,880,480	11,519,161,650	(205,281,170)	(1.78)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(11,306,711,314)	(11,470,555,900)	163,844,586	(1.42)
<i>Piutang Bukan Pajak (Netto)</i>	<i>7,169,166</i>	<i>48,605,750</i>	<i>(41,436,584)</i>	<i>(85.25)</i>
Persediaan	131,700	3,125,900	(2,994,200)	(95.78)
JUMLAH ASET LANCAR	506,752,011	537,693,147	(30,941,136)	(5.75)
ASET TETAP				
Tanah	913,731,000,000	913,731,000,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	15,193,044,529	14,144,603,754	1,048,440,775	7.41
Gedung dan Bangunan	24,168,696,056	23,203,040,067	965,655,989	4.16
Jalan, Irigasi dan Jaringan	94,812,402,256	93,239,665,606	1,572,736,650	1.68
Aset Tetap Lainnya	12,740,000	12,740,000	0	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	134,315,000	(134,315,000)	(100.00)
Akumulasi Penyusutan	(80,162,970,713)	(75,245,454,561)	(4,917,516,152)	6.53
JUMLAH ASET TETAP	967,754,912,128	969,219,909,866	(1,464,997,738)	(0.15)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	499,186,750	2,227,060,000	(1,727,873,250)	(77.58)
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(311,138,281)	(2,143,658,663)	1,832,520,382	(85.48)
JUMLAH ASET LAINNYA	188,048,469	83,401,337	104,647,132	125.47
JUMLAH ASET	968,449,712,608	969,841,004,350	(1,391,291,742)	(0.14)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	62,618,705	49,550,263	13,068,442	26.37
Pendapatan Diterima Dimuka	1,150,147,571	392,796,110	757,351,461	192.81
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,212,766,276	442,346,373	770,419,903	174.16
JUMLAH KEWAJIBAN	1,212,766,276	442,346,373	770,419,903	174.16
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	967,236,946,332	969,398,657,977	(2,161,711,645)	(0.22)
JUMLAH EKUITAS	967,236,946,332	969,398,657,977	(2,161,711,645)	(0.22)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan : NSAIET
 Tanggal : 06/06/22
 Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 **KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
UNIT ORGANISASI : 03 **DITJEN PERIKANAN TANGKAP**
WILAYAH/PROPINSI : 0200 **JAWA BARAT**
SATUAN KERJA : 622482 **PPN KEJAWANAN**

JENIS KEWENANGAN : KD **KANTOR DAERAH**

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	968,449,712,608	969,841,004,350	(1,391,291,742)	(0.14)

Cirebon, 31 Desember 2021
 Plt. Kepala PPN Kejawanan

Muklis, S.Pi
 NIP. 197911202005021002



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON (021) 3519070 (EXT:1239), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAN: <https://kkp.go.id/djpt>, SURAT ELEKTRONIK: djpt@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Bagus Oktori Sutrisno**

Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Muhammad Zaini**

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 Januari 2021

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Muhammad Zaini

Pihak Pertama
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Kejawan

Bagus Oktori Sutrisno

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Pendapatan nelayan meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	1	Jumlah nelayan yang terfasilitasi pendanaan usaha perikanan tangkap (orang)	5
2	Ekonomi sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	2	Nilai PNBP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Rp. Juta)	2.445
3	Tata Kelola Sumber Daya Ikan Bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	3	Jumlah Laporan Data Logbook Penangkapan Ikan Yang Telah Dikumpulkan dan Diverifikasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (laporan)	60
4	Produksi Perikanan Tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	4	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (ton)	3.930
5	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	5	Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang ditingkatkan fasilitasnya (unit)	1
6	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang berdaya saing dan berkelanjutan	6	Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (persen)	81
7	Pengelolaan awak kapal perikanan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	7	Jumlah nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya (orang)	15
8	Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	8	Persentase kapal perikanan yang berizin di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (persen)	75
9	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	9	IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (indeks)	72
		10	Nilai Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (nilai)	75,07
		11	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (nilai)	85,15
		12	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (persen)	72,50
		13	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (persen)	72,50
		14	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (nilai)	86
		15	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (nilai)	89

Program : 1. Pengelolaan Perikanan dan Kelautan Rp. 3.712.268.000
2. Dukungan Manajemen Rp. 9.913.410.000,
Jumlah Anggaran Tahun 2021 : Rp . 13.625.678.000,-

Jakarta, 14 Januari 2021

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Muhammad Zaini

Pihak Pertama
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Kejawanan

Bagus Oktori Sutrisno



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON (021) 3519070 (EXT:1239), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM: <https://kkp.go.id/djpt>, SURAT ELEKTRONIK: djpt@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Muklis**

Jabatan : Plt. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Muhammad Zaini**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 September 2021

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Pihak Pertama
Plt. Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Kejawanan

Muhammad Zaini

Muklis

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Pendapatan nelayan meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	1	Jumlah nelayan yang terfasilitasi pendanaan usaha perikanan tangkap (orang)	5
2	Ekonomi sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	2	Nilai PNBP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Rp. Juta)	2.445
3	Tata Kelola Sumber Daya Ikan Bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	3	Jumlah Laporan Data Logbook Penangkapan Ikan Yang Telah Dikumpulkan dan Diverifikasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (laporan)	60
4	Produksi Perikanan Tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	4	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (ton)	3.930
5	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	5	Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang ditingkatkan fasilitasnya (unit)	1
6	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang berdaya saing dan berkelanjutan	6	Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (persen)	81
7	Pengelolaan awak kapal perikanan yang bedaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	7	Jumlah nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya (orang)	15
8	Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	8	Persentase kapal perikanan yang berizin di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (persen)	75
9	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	9	IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (indeks)	73
		10	Nilai Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (nilai)	75,07
		11	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (nilai)	85,15
		12	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (persen)	72,50
		13	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (persen)	72,50
		14	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (nilai)	86
		15	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (nilai)	89

Program : 1. Pengelolaan Perikanan dan Kelautan Rp. 3.417.180.000,-
2. Dukungan Manajemen Rp. 9.142.189.000,-

Jumlah Anggaran Tahun 2021 : Rp . 12.559.369.000,-

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Jakarta, 01 September 2021
Pihak Pertama
Plt. Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Kejawanan



Muhammad Zaini

Muklis

Lampiran 5.8.1

Rekap Surat Masuk 2021

KODE KLASIFIKASI SURAT	JUMLAH SURAT	Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
TU	263	16	16	21	20	14	18	22	17	18	33	36	32
KU	36	2	3	5	3	5	5	2	1	8	1	-	1
KP	86	8	5	6	3	6	3	3	5	6	11	16	14
PL	20	2	5	2	2	1	1	-	4	-	1	-	2
PI	26	3	5	4	2	3	1	-	3	2	1	-	2
HM	665	55	84	75	33	48	67	70	34	43	61	42	53
RC	7	1	2	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-
OT	4	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1
PB	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DL	8	2	2	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-
HK	5	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-
	1120	89	122	114	63	77	97	101	67	80	108	97	105

Rekap Surat Keluar 2021

KODE KLASIFIKASI SURAT	JUMLAH SURAT	Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
TU	185	26	12	14	11	8	10	19	9	20	17	16	23
KU	157	8	7	4	10	15	13	7	8	12	22	22	29
KP	306	42	18	35	19	18	24	36	11	25	27	35	16
PL	346	80	55	45	36	6	14	11	36	16	17	19	11
PI	102	20	18	10	8	5	1	12	9	-	6	11	2
HM	35	4	3	4	3	5	5	4	-	1	2	2	2
RC	6	-	1	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-
OT	6	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	2	-
PB	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
DL	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HK	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	1146	180	114	112	87	59	69	92	74	75	93	108	83